## DATA INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2003 s.d 2025

NO.	NAMA PERATURAN	PENG-UND ANGAN	STATUS	HASIL PENELUSURAN	REKOMENDASI	SKPD	PELAKSANAAN	KETERANGAN
Tahu	n 2003							
	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2003 Tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Daerah	2003	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah		SELESAI
	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	23 Juli 2003	-	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2003 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	11 April 2003	Berlaku	PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	_	SELESAI
	Thn 2003 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	11 April 2003	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2009	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	_	SELESAI
Tahu	n 2004							
	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2004 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja			PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	_	SELESAI

2	Daerah Tahun Anggaran 2004						
T	Peraturan Daerah No. 17 Fhn 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Fahun Anggaran 2004		· ·	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	- S	ELESAI
F F F	Peraturan Daerah No. 16 Ihn 2004 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Iahun Anggaran 2003			PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	- S	ELESAI
F F	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2004 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008			PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- S	ELESAI
	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2004 Tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008		1	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- S	ELESAI
T	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2004 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2008			PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- S	ELESAI
T	Peraturan Daerah No. 12 Fhn 2004 Tentang Penetapan Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara	07 Juli 2004		PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	-	

8	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003-2012	07 Juli 2004		PERDA ini tidak mempunyai -daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Pe Pr	inas ermukiman dan rasarana /ilayah	SE	LESAI
9	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2004 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	Berlaku		Pe	inas endapatan aerah		
10	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2022	PERDA ini sudah tidak berlaku.	OI Ke Se	agian rganisasi dan epegawaian ekretariat aerah	SE	LESAI
11	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2004 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2007	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Pe Ma da Ke	antor emberdayaan lasyarakat Desa an esejahteraan osial	SE	LESAI
12	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2004 Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 7 Thn 2007	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Pe Ma da Ke	antor emberdayaan lasyarakat Desa an esejahteraan osial	SE	LESAI
	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Oi	agian rganisasi dan epegawaian	SE	LESAI

	Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008			Sekretariat Daerah	
14		29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	SELESAI
15			(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	SELESAI
16		29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2006	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	SELESAI
17		29 April 2004	Berlaku	PERDA ini tidak memerlukan Pedoman Teknis untuk menjelaskan materi muatan PERDA.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 1	29 April 2004	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 8 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	SELESAI

Tahu	ın 2005							
1	Thn 2005 Tentang	28 Desember 2005	_	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga- Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Desember	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah		SELESAI
3		22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah		SELESAI
4	Thn 2005 Tentang Izin	22 Desember 2005	Berlaku	-	Agar dilakukan Evluasi terhadap PERDA ini	Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah	E	BELUM SELESAI
5		22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah		SELESAI
6		22 Desember 2005	(Tidak Berlaku) Dicabut	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Pemerintahan Sekretariat		SELESAI

7	Thn 2005 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten	22	dengan Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Daerah  Bagian Ekonomi - Sekretariat Daerah	S	ELESAI
	Penajam Paser Utara		Peraturan Daerah No. 3 Thn 2020					
8	Thn 2005 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga di Kabupaten Penajam Paser Utara	2005	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 21 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial		ELESAI
9	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005	19 Agustus 2005		PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	S	ELESAI
10		22 Juli 2005	<b>'</b>	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	S	ELESAI
11	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2005 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara	22 Juli 2005		PERDA ini masih sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengimgat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	S	ELESAI

<mark>Tahı</mark> 1	un 2006 Peraturan Daerah No. 12 Thn 2006 Tentang	29 Juni 2006	1	Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagai dasar masih belum ada perubahan.  PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Keuangan	-  -	SELESAI
	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006					Sekretariat Daerah		
2	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Pelabuhan Khusus	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Angkutan Umum Di Jalan	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 13 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 2 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI

			Daerah No. 9 Thn 2012					
6	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi		Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		ELESAI
7	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 11 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	S	ELESAI
8	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2006 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 14 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	S	ELESAI
9	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2006 Tentang Retribusi Terminal	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 15 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	S	ELESAI
10	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2006 Tentang Pajak Reklame	17 April 2006	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 20 Thn 2011	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	S	ELESAI

11	Thn 2006 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Peraturan Daerah No. 1 Thn 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	17 April 2006 17 April 2006	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 5 Thn 2012 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku. PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah  Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat	SELESAI
	Kabupaten Penajam Paser Utara		Peraturan Daerah No. 9			Daerah	
Tabi	- 0007		Thn 2008				
Tahu 1	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2007 Tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan	14 Desember 2007	Berlaku	sekitar 20 Pasal yang memerintahkan pemberntukan PERBUP sebagai pedoman pelaksanaan. b) Telahi terbit PERDA No.	a) Menyarankan untuk melakukan evaluasi Materi PERDA apakah ada yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, b) Menyarankan membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA.		BELUM SELESAI

Peraturan Daerah No. 16 Thn 2007 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Akta Catatan Sipil		(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2oi3 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
Peraturan Daerah No. 15 Thn 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara	Desember	(Tidak	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
Peraturan Daerah No. 14 Thn 2007 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	Desember 2007		tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil	No. 14 Thn 2007 ttg Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		BELUM SELESAI

	Keuangan Kepada Partai	
	Politik sebagaimana telah	
	beberapa kali diubah	
	terakhir dengan PP No. 1	
	Tahun 2018 tentang	
	Perubahan Kedua atas PP	
	No. 5 Tahun 2009 tentang	
	Bantuan Keuangan	
	Kepada Partai Politik.	
	c) PP No. 12 Tahun 2019	
	tentang Pengelolaan	
	Keuangan Daerah.	
	d) PERMENDAGRI No. 36	
	Tahun 2018 tentang Tata	
	Cara Penghitungan,	
	Penganggaran Dalam	
	Anggaran Pendapatan dan	
	Belanja Daerah, Dan	
	Tertib	
	Administrasi Pengajuan,	
	Penyaluran, Dan Laporan	
	Pertanggungjawaban	
	Penggunaan Bantuan	
	Keuangan Partai Politik	
	sebagaimana telah diubah	
	dengan PERMENDAGRI No.	
	78 Tahun 2020.	
	e) PERMENDAGRI No. 77	
	Tahun 2020 Tentang	
	Pedoman Pengelolaan	
	Keuangan Daerah;	
	seyogyanya dilakukan	
	evaluasi terhadap PERDA	
	No. 14 Thn 2007 ttg Bantuan	
	Keuangan Kepada Partai	
	Politik Yang Mendapat Kursi	
I		

				di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melakukan strukturisasi ulang mana yang diatur di PERDA, agar tidak telalu berpengaruh apabila ada Peraturan yang lebih tinggi terbit, dan materi mana dapat didelegasikan pada PERBUP sebagai pedoman teknis pelaksanaan.			
	1	Desember 2007	`	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2007 Tentang	Desember 2007	`	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 11	14 Desember	<u> </u>	Perangkat Daerah sebagai pembantu Kepala Daeah dalam mengelola urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seprti Dinas Kehutanan dan Perkebunan sementara	terhadap PERDA No. 11 Thn 2007 ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada	Dinas Kehutanan - dan Perkebunan	BELUM SELESAI

				b) Dalam PERBUP No. 52 Thn 2024 ttg Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak ada mengatur tentang izin Pemanfaatan Kayu, sehingga Pemerintah Daerah harus mencermati regulasi ini			
				agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan saat ini.			
8	Thn 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2007 Tentang Tata cara Pemilihan, Pencalonan,	14 Desember 2007	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	SELESAI

	Pengangkatan dan		Peraturan			Kesejahteraan		
	Pemberhentian Kepala		Daerah No. 1			Sosial		
	Desa		Thn 2015					
10	Peraturan Daerah No. 8	14	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Kantor -	9	SELESAI
	Thn 2007 Tentang	Desember	Berlaku)	berlaku.		Pemberdayaan		
	Organisasi Pemerintah	2007	Dicabut			Masyarakat Desa		
	Desa		dengan			dan		
			Peraturan			Kesejahteraan		
			Daerah No. 1			Sosial		
			Thn 2015					
11	Peraturan Daerah No. 7	14	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Kantor -	S	SELESAI
	Thn 2007 Tentang Badan	Desember	Berlaku)	berlaku.		Pemberdayaan		
	Permusyawaratan Desa	2007	Dicabut			Masyarakat Desa		
			dengan			dan		
			Peraturan			Kesejahteraan		
			Daerah No. 1			Sosial		
			Thn 2015					
12	Peraturan Daerah No. 6	_	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Bagian -	5	SELESAI
	Thn 2007 Tentang	2007	Daya Guna	daya guna akibat telah		Keuangan		
	Anggaran Pendapatan			melampaui waktu atau tahun		Sekretariat		
	Dan Belanja Daerah			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
	Kabupaten Penajam							
	Paser Utara Tahun 2007							
13		30 Mei 2007	ľ	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian -	\$	SELESAI
	Thn 2007 Tentang		Berlaku)	berlaku.		Organisasi dan		
	Peningkatan Status		Dicabut			Kepegawaian		
	Kantor Perhubungan Dan		dengan			Sekretariat		
	Pariwisata Menjadi Dinas		Peraturan			Daerah		
	Perhubungan Dan		Daerah No.					
	Pariwisata Kabupaten		10 Thn 2008					
4.4	Penajam Paser Utara	00 Mai 000	7/7:-1-1-			Danian		DELEGAL
14		30 Mei 2007	ľ	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian -		SELESAI
	Thn 2007 Tentang		Berlaku)	berlaku.		Organisasi dan		
	Pembentukan Kantor		Dicabut			Kepegawaian		
	Lingkungan Hidup		dengan			Sekretariat		
	Kabupaten Penajam		Peraturan			Daerah		
	Paser Utara		Daerah No.	I	I	1		

			11 Thn 2008					
15	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2007 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Penajam Paser Utara	30 Mei 2007	Berlaku	khusus tidak ada Pasal memerintahkan untuk membuat Pedoman Pelaksanaan dari PERDA,	Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan Pembentukan Dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Di Kabupaten Penajam Paser Utara.		TIDAK ADA PENGAJUAN	
16	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2007 Tentang Ijin Reklame	30 Mei 2007		Pasal yang mengatur	Menetapkan PERBUP ttg Pedoman Pelaksanaan PERDA.	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	TIDAK ADA PENGAJUAN RAPERBUP	BELUM SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2007 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan	30 Mei 2007	I'	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah		SELESAI

Tahun 2008					
Peraturan Daerah No. 13 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara	deng Pera Daer Thn	aku) berlaku. abut gan aturan erah No. 3 2016	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 12 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	deng Pera Bupa	aku) berlaku. abut	_	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 11 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupater Penajam Paser Utara	deng Pera Daer	aku) berlaku. abut	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 10 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara	deng Pera Daer	aku) berlaku. abut	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 9 Thn 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daeral Kabupaten Penajam	deng Pera Daer	aku) berlaku. abut	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI

Paser Utara	4.C. Olstobor	Darloku	\ DEDDA !!! ditadeither	MA DEDDA	Dagian	DEL	LIM CELEC
Peraturan Daerah No. 8	16 Oktober	Вепаки Г		Mengevaluasi PERDA	Bagian -	BEI	.UM SELES
Thn 2008 Tentang Urusar	12008		berdasarkan PP 38 Tahun		Pemerintahan		
Yang Menjadi			2007 tentang Pembagian	Urusan Yang Menjadi	Sekretariat		
Kewenangan				Kewenangan	Daerah		
Pemerintahan Daerah			,	Pemerintahan Daerah.			
			Pemerintahan Daerah				
			Provinsi, Dan				
			Pemerintahan Daerah				
			Kabupaten/Kota, dan PP				
			ini merupakan				
			pelaksanaan UU No. 32				
			Tahun 2004 tentang				
			Pemerintahan Daerah dan				
			UU No. 25 Tahun 2007				
			tentang Penanaman				
			Modal dan telah diubah				
			dengan UU Cipta Kerja				
			terakhir dengan UU 6				
			Tahun 2023.				
			b) Namun UU No. 32 Tahun				
			2004 dan UU No. 25				
			Tahun 2007 telah				
			beberapa kali diubah.				
			c) Berdasarkan hal,				
			seyogyanya PERDA No. 8				
			Thn 2008 ttg Urusan Yang				
			Menjadi Kewenangan				
			Pemerintahan Daerah,				
			dievaluasi apakah				
			Substansi yang diatur				
			termasuk lampiran detail				
			kewenangan Daerah				
			masih relevan atau ada				
			yang tidak sesuai dengan				
			Peraturan perudangan				

				yang lebih tingg.			
7	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2008 Tentang	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak - berlaku		Dinas Pendapatan	SELESAI
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		Dicabut dengan			Daerah	
			Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012				
8	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	P	Pendapatan Paerah	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri	28 Agustus 2008	+	PERDA ini sudah tidak berlaku.	P	Pendapatan Paerah	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan		Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.	P	Dinas Pendapatan Daerah	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2008 Tentang Retribusi Jasa Laboratorium Dan Workshop	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2012	PERDA ini sudah tidak berlaku.	P	Pendapatan Paerah	SELESAI

12	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	28 Agustus 2008	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2013	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Dinas Pendapatan Daerah	SELESAI
	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	13 Agustus 2008	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.		Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	SELESAI
Tahu	n 2009	h 4	ber 1 1 5	I====		ь ·	locu con l
1	Thn 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008	24 Desember 2009	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.		Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	SELESAI
2		03 Desember 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 29 Thn 2009 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa	03 Desember 2009	Berlaku	<ul> <li>a) PERDA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.</li> <li>b) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan</li> </ul>	No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BELUM SELESAI

Thn 2009 Tentang Desember Berlaku) berlaku. Penetapan Jenis Urusan 2009 Dicabut Penetapan Jenis Urusan 2009 Dicabut	4 Peraturan Daerah No. 28 03	unda 2014 c) PER Tahu Peda Desa Petu peny dan petu pelal pemi lanju pera d) Tela No. 7 Pena Desa diuba No. 7 Peru Bupa 2019 Pena Desa ketel RPJI tidak tekni RPJI	yusunan RPJM Desa RKP Desa serta Injuk teknis Iksanaan kegiatan Ibangunan Desa lebih It diatur dengan Ituran bupati/walikota. Ih diterbitkan PERBUP 7 Thn 2019 ttg gelolaan Keuangan Ia sebagaimana telah Ibah dengan PERBUP 16 Thn 2021 ttg Ilbahan Atas Peraturan Intuan RKPDesa dan IMDesa diatur, namun Ik lengkap pengaturan Iis penyusunan IMDesa.	2015 sehubungan dengan adanya Perubahaan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norrma pencabutan. b) Menyempurnakan PERBUP No. 7 Thn 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 16 Thn 2021 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Badan	SELESAI
	Thn 2009 Tentang Desembe	Berlaku) berlaku			Pemberdayaan	OLLLOAI
l Pemerintahan Kabupaten I dengan I least le						
	Pemerintahan Kabupaten	dengan			Pemerintahan	
Penajam Paser Utara Peraturan Desa	_	1 -			Desa	

	Yang Diserahkan Kepada		Daerah No. 1					
	Desa		Thn 2015					
5	Peraturan Daerah No. 27	10	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Bagian		SELESAI
	Thn 2009 Tentang	September		daya guna akibat telah		Keuangan		
	Perubahan Anggaran	2009		melampaui waktu atau tahun		Sekretariat		
	Pendapatan Dan Belanja			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
	Daerah Kabupaten							
	Penajam Paser Utara							
	Tahun Anggaran 2009							
6	Peraturan Daerah No. 25	30 Juli 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas	· <b>[</b> E	BELUM SELESAI
	Thn 2009 Tentang					Kehutanan,		
	Pengembangan Wilayah					Perkebunan dan		
	dan Masyarakat Di Sekitar	1				Pertambangan		
	Wilayah Usaha							
	Pertambangan							
7	Peraturan Daerah No. 24	30 Juli 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Pertanian,	· [E	BELUM SELESAI
	Thn 2009 Tentang Ijin					Perternakan,		
	Usaha Perikanan					Perikanan dan		
						Kelautan		
8	Peraturan Daerah No. 23	30 Juli 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Pertanian,	· [E	BELUM SELESAI
	Thn 2009 Tentang					Perternakan,		
	Perijinan Budidaya Ikan					Perikanan dan		
						Kelautan		
9		30 Juli 2009	ľ	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas		SELESAI
	Thn 2009 Tentang		· '	berlaku.		Pendapatan		
	Retribusi Lalu Lintas		Dicabut			Daerah		
	Hewan		dengan					
			Peraturan					
			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
10	Peraturan Daerah No. 21	B0 Juli 2009	Berlaku	-	-	Dinas	·	BELUM SELESAI
	Thn 2009 Tentang Hutan					Kehutanan,		
	Kota Kabupaten Penajam					Perkebunan dan		
<u> </u>	Paser Utara					Pertambangan		
11	Peraturan Daerah No. 20	B0 Juli 2009	Berlaku	-	-	Dinas Koperasi,	· [	BELUM SELESAI
	Thn 2009 Tentang					UKM,		
	Kerjasama Pemerintah					Perindustrian dan		

Daerah Dengan Badan Hukum Dalam Penyediaan Sumber Daya Tenaga Listrik					Perdagangan	
	2009	,	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Dinas Pendapatan Daerah	SELESAI
	04 Juni 2009	Berlaku	Perlu Evaluasi		Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah	BELUM SELESAI
	03 Juni 2009	Berlaku			Bagian Pemeritahan Sekretariat Daerah	BELUM SELESA
	04 Juni 2009	,	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan	SELESAI
	04 Juni 2009		<ul> <li>a) PERDA ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.</li> <li>b) PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah dicabut dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-</li> </ul>	·	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BELUM SELESA

				undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.			
17	Sumber Pendapatan Desa	2009			Perlu Evaluasi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BELUM SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2009 Tentang Alokasi Dana Desa		idak Punya Daya Guna	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada ketentuan yang mengatur Alokasi Dana Desa ADD, Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), bahwa Pengalokasian ADD sebagaimana	Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahaan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut dapat memuat norrma pencabutan.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI

				Desa.				
19	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2009 Tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1		a) Telah terbit PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan	PERDA baru yang mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	SEDANG DALAM PROSES PENETAPAN BUPATI	BELUM SELESAI
0.0		00 4 "		77 Tahun 2020.		<b>.</b>		DELLINA OEL EQAL
	Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi Dan Pembangunan Daerah	2009	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah		BELUM SELESAI
21	Peraturan Daerah No. 10	29 April	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Badan	-	SELESAI

1	Thn 2009 Tentang	2009	Berlaku)	berlaku.		Pemberdayaan		
	Pembentukan Dan		Dicabut			Masyarakat dan		
	Pengelolaan Badan		dengan			Pemerintahan		
	Usaha Milik Desa		Peraturan			Desa		
			Daerah No. 1					
			Thn 2015					
2	Peraturan Daerah No. 9	29 April	Tidak Punya	1) Peraturan	a) Karena dalam PERDA	Badan	1) PERBUP No. 7 Thn	SELESAI
Ì	Thn 2009 Tentang	2009	Daya Guna	Menteri Dalam	No, 1 Thn 2015 ttg	Pemberdayaan	2019 ttg Pengelolaan	
	Penyusunan Anggaran			Negeri Nomor	Desa, tidak	Masyarakat dan	Keuangan Desa. 2)	
	Pendapatan Dan Belanja			20 Tahun	mencantumkan	Pemerintahan	PERBUP No. 16 Thn 2021	
	Desa			2018 tentang	pencabutan PERDA	Desa	ttg 2) Perubahan Atas	
				Pengelolaan	No. 9 Thn 2009, agar		Peraturan Bupati Nomor 7	
				Keuangan	dalam Perubahan atau		Tahun 2019 Tentang	
				Desa pada	Penyempurnaan		Pengelolaan Keuangan	
				Pasal 31	PERDA No. 1 Thn		Desa.	
				Ayata (2) dan	2015 sehubungan			
				Ayat (3) dan	dengan adanya			
				diperkuat	Perubahaan UU Desa			
				Pasal 73	terbaru, agar PERDA			
				bahwa	lama tersebut dapat			
				Sekretaris	memuat norrma			
				Desa mengoor	pencabutan.			
				dinasikan	b) Walaupun Pemerintah			
				penyusunan	Daerah telah			
				rancangan	menetapkan PERBUP			
				APB Desa	No. 7 Thn 2019 ttg			
				berdasarkan	Pengelolaan Keuangan	,		
				RKP Desa	Desa sebagaimana			
				tahun	telah iubah dengan			
				berkenaan	PERBUP No. 16 Thn			
				dan pedoman	2021 ttg 2) Perubahan			
				penyusunan	Atas Peraturan Bupati			
				APB Desa	Nomor 7 Tahun 2019			
				yang diatur	Tentang Pengelolaan			
				dengan	Keuangan Desa,			
				Peraturan	dimana dalam			
				Clatalan				

MENDAGRI tersebut
-------------------

		Tidak Punya Daya Guna	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khusus pada ketentuan mengatur Perangkat Desa Pasal 70: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat	No, 1 Thn 2015 ttg Desa, tidak mencantumkan pencabutan PERDA No. 8 Thn 2009, agar dalam Perubahan atau Penyempurnaan PERDA No. 1 Thn 2015 sehubungan dengan adanya Perubahaan UU Desa terbaru, agar PERDA lama tersebut	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		SELESAI	
--	--	--------------------------	---	---	---	--	---------	--

27	Peraturan Daerah No. 4	29 April	Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Kesehatan	<u> </u>	BELUM SELESAI
26	Thn 2009 Tentang Izin Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Penajam Paser Utara	29 April 2009	Berlaku		Perlu Evaluasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		BELUM SELESAI
25	Thn 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 9 Thn 2018		-	Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah		SELESAI
24	Thn 2009 Tentang Pembentukan Peraturan Desa	29 April 2009	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	Perda/Perkada, namun dengan ditetapaknnya PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa, menjadi PERDA No. 8 Thn 2009 tidak memiliki daya guna. karena dalam sesuai dengan Pasal 108 PERDA No, 1 Thn 2015 ttg Desa diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.  PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa		SELESAI

	Thn 2009 Tentang Ijin Penyelenggaraan Sarana	2009						
	Dan Tenaga Kesehatan							
28		29 April	Berlaku		-	Bagian Hukum	-	SELESAI
		2009				Sekretariat		
	Penerbitan Lembaran					Daerah		
	Daerah Dan Berita Daerah							
29	Peraturan Daerah No. 2	28 Januari	Tidak Punya	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian	-	SELESAI
	Thn 2009 Tentang	2009	Daya Guna	berlaku.		Keuangan		
	Anggaran Pendapatan					Sekretariat		
	Dan Belanja Daerah					Daerah		
	Tahun Anggaran 2009							
30		28 Januari	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Badan	-	SELESAI
	Thn 2009 Tentang	2009	1	daya guna akibat telah		Perencana		
	Rencana Pembangunan			melampaui waktu atau tahun		Pembangunan		
	Jangka Menengah Daerah			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
	(RPJMD) Kabupaten							
	Penajam Paser Utara							
	Tahun 2008-2013							
Tahu	n 2010							
1		27	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai  -	-	Bagian	-	SELESAI
	Thn 2010 Tentang	Desember	Daya Guna	daya guna akibat telah		Keuangan		
	Anggaran Pendapatan	2010		melampaui waktu atau tahun		Sekretariat		
	Dan Belanja Daerah			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
	Kabupaten Penajam							
	Paser Utara Tahun							
	Anggaran 2011							
2	Peraturan Daerah No. 19	09	Berlaku	PERDA mengamanatkan	-	Bagian	-	SELESAI
	Thn 2010 Tentang	Desember		Pelaksanaan Penyertaan		Keuangan		
	Penyertaan Modal	2010		Modal dengan menggunakan:		Sekretariat		
	Pemerintah Kabupaten			a) Penganggaran APBD TA		Daerah		
	Penajam Paser Utara			2005.				
	Kepada PT. Bank			b) Penganggaran APBD TA				
	Pembiayaan Rakyat			2006.				
	Syariah Ibadurahman			,				
	Penajam Untuk			c) Penganggaran APBD TA   2010.				

Mikro, Kecil Dan Menengah						
Peraturan Daerah No. 18 Thn 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	09 Desember 2010	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan: a) Penganggaran APBD TA 2003. b) Penganggaran APBD TA 2004. c) Penganggaran APBD TA 2005. d) Penganggaran APBD TA 2010.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
Peraturan Daerah No. 16 Thn 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2010	13 Oktober 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	_	SELESAI
Peraturan Daerah No. 15 Thn 2010 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2009	11 Oktober 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai - daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	_	SELESAI
Peraturan Daerah No. 14 Thn 2010 Tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir	16 Juni 2010	Berlaku		UKM, Perindustrian dan Perdagangan	1) PERBUP No. 12 Thn 2017 ttg Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir. 2) PERBUP No. 4 Thn 2022 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati	

						Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir.	
	16 Juni 2010	Berlaku	-		Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan;		SELESAI
Peraturan Daerah No. 12 Thn 2010 Tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan	16 Juni 2010	Berlaku	untuk membentuk PERBUP dalam 15 materi Muatan Pasal, yakni: Pasal 4 ayat(3), Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (2),	<ul> <li>a) Perlu menetapkan PERBUP yang mengatur pertunjuk pelaksanaan PERDA, walaupu ada beberapa PERBUP yang diterbitkan tetapi sebagaian besar amanat PERDA menjadi muatan dalam pengaturan PERBUP.</li> <li>b) PERDA ini secara umum disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU ini masih berlaku, namun demikian perlu dilakukan evaluasi</li> </ul>	Pemuda dan Olahraga	a) PERBUP No. 32 Thn 2018 ttg Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah. b) PERBUP No. 16 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. (Mencabut PERBUP No. 18 Thn 2012). c) PERBUP No. 19 Thn 2020 ttg Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. d) PERBUP No. 54 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.	

Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Giri Purwa Di Kecamatan Penajam	2010		Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	terkait regulasi baru sebagai penjabaran UU Sikdiknas tersebut. c) Berdasarkan hal tersebut diatas sangat terbuka untuk dilakukan Penyempurnaan PERDA atau Pembentukan PERDA yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI
Peraturan Daerah No. 10 Thn 2010 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	08 Februari 2010		-	-	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja	SELESAI
		ľ`	PERDA ini sudah tidak berlaku.	_	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI

12			(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	SELESAI
13	Peraturan Daerah No. 7	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Binuang Dan Desa Telemow Di Kecamatan Sepaku	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI
15	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Sidorejo Di Kecamatan Penajam	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Bangun Mulya Di Kecamatan Waru	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SELESAI
17	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2010 Tentang Pembentukan Desa Gunung Mulia Di	08 Februari 2010	Berlaku	Tidak memerlukan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	SELESAI

	Kecamatan Babulu					Desa		
18	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2010 Tentang Pengelolaan Sampah	08 Februari 2010	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 4 Thn 2021	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Kantor Lingkungan Hidup	S	ELESAI
19	Thn 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010	20 Januari 2010	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	S	ELESAI
Tahu	ın 2011							
1	Peraturan Daerah No. 23 Thn 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	Desember 2011	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		ELESAI
2	Peraturan Daerah No. 22 Thn 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010	27 Desember 2011	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	S	ELESAI
3		29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	S	ELESAI
4	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2011 Tentang Pajak		(Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas Pendapatan	S	ELESAI

5	Reklame  Peraturan Daerah No. 19 Thn 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan	29 November 2011	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	berlaku.  PERDA ini sudah tidak -berlaku.	Daerah  Dinas Pendapatan Daerah	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2011 Tentang Pajak Parkir	29 November 2011	Daerah No. 1 Thn 2024 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1	PERDA ini sudah tidak - berlaku.	Dinas - Pendapatan Daerah	SELESAI
7	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	29 November 2011	Thn 2024 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Dinas - Pendapatan Daerah	SELESAI
8	Peraturan Daerah No. 16 Thn 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	29 November 2011	Thn 2024 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak -berlaku.	Dinas Pendapatan Daerah	SELESAI
9	Peraturan Daerah No. 15 Thn 2011 Tentang Retribusi Terminal	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Dinas Pendapatan Daerah	SELESAI

10	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	29 November 2011	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	- S	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek	29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	- S	SELESAI
12		29 November 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
13	Thn 2011 Tentang	24 November 2011		PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	- S	SELESAI
	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2011 Tentang Pajak	September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah	- S	SELESAI

	Paser Utara		Daerah No. 1 Thn 2024				
15	Restoran Di Kabupaten Penajam Paser Utara	2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
16	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kabupaten Penajam Paser Utara	08 September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
17		08 September 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Dinas Pendapatan Daerah	-	SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara	06 Juli 2011		PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2011.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
19	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22 Maret 2011	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI

			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
		22 Maret	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas	-	SELESAI
	Thn 2011 Tentang	2011	Berlaku)	berlaku.		Pendapatan		
	Retribusi Parkir Di Tepi		Dicabut			Daerah		
	Jalan Umum		dengan					
			Peraturan					
			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
21	Peraturan Daerah No. 3	22 Maret	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas	-	SELESAI
	Thn 2011 Tentang Pajak	2011	Berlaku)	berlaku.		Pendapatan		
	Sarang Burung Walet		Dicabut			Daerah		
			dengan					
			Peraturan					
			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
22	Peraturan Daerah No. 2	14 Maret	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas	-	SELESAI
	Thn 2011 Tentang Bea	2011	Berlaku)	berlaku.		Pendapatan		
	Perolehan Hak Atas		Dicabut			Daerah		
	Tanah Dan Bangunan		dengan					
			Peraturan					
			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
23	Peraturan Daerah No. 1	05 Januari	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian	-	SELESAI
	Thn 2011 Tentang	2011	Berlaku)	berlaku.		Organisasi dan		
	Perubahan Kedua Atas		Dicabut			Tata Laksana		
	Peraturan Daerah		dengan			Sekretariat		
	Kabupaten Penajam		Peraturan			Daerah		
	Paser Utara Nomor 10		Daerah No. 3					
	Tahun 2008 Tentang		Thn 2016					
	Organisasi Dan Tata Kerja	ı						
	Dinas-Dinas Daerah							
	Kabupaten Penajam							
	Paser Utara							
Tahu	ın 2012							
1	Peraturan Daerah No. 25		Berlaku	Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Kehutanan	-	BELUM SELESAI
	Thn 2012 Tentang Izin	Desember				dan Perkebunan		1

	Kabupaten Penajam Paser Utara	2012					
	Peraturan Daerah No. 24 Thn 2012 Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove	28 Desember 2012	pembentukan PERBUP yang mengatur teknis Pengelolaan	ייייטייט ייייש פיייט אויי פיייי	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
	Peraturan Daerah No. 23 Thn 2012 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al- Quran	Desember	mengatur teknis Pendidikan Baca Tulis Al-Quran pada	teknis penyelenggaran	Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	ttg Penyelenggaraan Pendidikan Baca Tulis Al- Quran Di Daerah.	SELESAI (Catatan: agar materi diatur dievaluasi, apakah telah mengakomodir seluruh amanat Pasal dalam PERDA)
4	Peraturan Daerah No. 22 Thn 2012 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara	28 Desember 2012	mengatur teknis kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Pasal 20).	<ul> <li>a) Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan Di Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>b) Materi Pasal PERBUP dapat mengatur Teknis Pelaksanaan secara keseluruhan dari PERDA.</li> <li>c) Materi PERBUP dapat saling terkait dengan PERDA No. 22 Thn 2012 ttg Pembinaan dan Pengembangan</li> </ul>	Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELEŠAI

5		2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2015	PERDA ini sudah tidak berlaku.		Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	-	SELESAI
6	Peraturan Daerah No. 20 Thn 2012 Tentang Izin Gangguan			<ul> <li>a) PERDA No. 20 Thn 2012 ttg Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan delegasi/perintah dari Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah pada Pasal 2 ayat (1), Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah.</li> <li>b) Telah terbit PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan PERMENDAGRI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI Nomor</li> </ul>	disarankan untuk dicabut.	Perekonomian	TIDAK ADA PENGAJUAN UNTUK PENCABUTAN	BELUM SELESAI

Thn 2012 Tentang		Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun	-	Bagian Keuangan Sekretariat	•	SELESAI
 Peraturan Daerah No. 19	hg	Tidak Punya	Daerah.		Ragion	-	SELESAI
			dilaksanakan/diterapkan di				
			Thn 2012 sudah tidak				
			sehingga PERDA No. 20				
			dan Pemerintah Daerah,				
			antara Pemerintah Pusat				
			Hubungan Keuangan				
			No. 1 Tahun 2022 tentang				
			Retribusi Dareah dan UU				
			tentang Pajak Daerah dan				
			PERDA 1 Thn 2024				
			bertentangan dengan				
			Gangguang juga				
			mengenai Retribusi Izin				
			2012 ttg Izin Gangguan				
			dalam PERDA No. 20 Thn				
			c) Subtasnsi yang diatur				
			sehingga perlu dicabut.				
			business) di Indonesia				
			berusaha (ease of doing				
			dan tuntutan kemudahan				
			perkembangan keadaan,				
			sudah tidak sesuai dengan				
			Nomor 22 Tahun 2016				
			dengan PERMENDAGRI				
			sebagaimana telah diubah				
			27 Tahun 2009				
			PERMENDAGRI Nomor				
			disebutkan bahwa bahwa				
			dalam pertimbangannya				
			Gangguan Di Daerah yang				
			27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin				

	dan Belanja Daerah			pelaksanaan kegiatan.	Daerah		
		Desember 2012		a) Berdasarkan Pasal 3 : Sumber dana penyertaan modal bersumber dari APBD yang dianggarkan mulai tahun sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kemampuan keuangan daerah. b) Masih didentifikasi apakah Penyertaan Modal telah dilaksanakan.	Perekonomian		BELUM TERIDE NTFIKASI
	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara	Desember	<b>'</b>	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
10	Peraturan Daerah No. 16	Desember	<b>'</b>	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 15	Desember		PERDA ini sudah tidak berlaku.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	-	SELESAI

	Dan Tata Kerja Badan		Daerah No. 3					
	Perencana Pembangunan		Thn 2016					
	Daerah, Inspektorat Dan							
	Lembaga Teknis Daerah							
	Kabupaten Penajam							
	Paser Utara							
12	Peraturan Daerah No. 14	19 Oktober	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Bagian	-	SELESAI
		2012	Daya Guna	daya guna akibat telah		Keuangan		
	Perubahan Anggaran		'	melampaui waktu atau tahun		Sekretariat		
	Pendapatan Dan Belanja			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
	Daerah (P-APBD)							
	Kabupaten Penajam							
	Paser Utara Tahun							
	Anggaran 2012							
13	Peraturan Daerah No. 13	19 Oktober	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Bagian	-	SELESAI
	Thn 2012 Tentang	2012	Daya Guna	daya guna akibat telah		Keuangan		
	Pertanggungjawaban			melampaui waktu atau tahun		Sekretariat		
	Pelaksanaan Anggaran			pelaksanaan kegiatan.		Daerah		
	Pendapatan Dan Belanja			ľ				
	Daerah Tahun Anggaran							
	2011							
14	Peraturan Daerah No. 12	03	(Tidak	PERDA ini sudah tidak		Bagian	-	SELESAI
	Thn 2012 Tentang	September	Berlaku)	berlaku.		Perekonomian		
	Perubahan Peraturan	2012	Dicabut			Sekretariat		
	Daerah Nomor 4 Tahun		dengan			Daerah		
	2003 Tentang Perusahaan		Peraturan					
	Daerah Kabupaten		Daerah No.					
	Penajam Paser Utara		13 Thn 2017					
15		03	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas Kesehatan	-	SELESAI
	Thn 2012 Tentang	September	Berlaku)	berlaku.				
	,	2012	Dicabut					
	Kesehatan Di Pusat		dengan					
	Kesehatan Masyarakat		Peraturan					
	Kabupaten Penajam		Daerah No. 1					
	Paser Utara		Thn 2024					
	Peraturan Daerah No. 10		(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-		PERBUP No. 20 Thn 2017	SELESAI
	Thn 2012 Tentang	September	Berlaku)				ttg Petunjuk Teknis	

	Jaminan Pelayanan	2012	Dicabut	berlaku.			Pelaksanaan Satuan	
	Kesehatan Di Kabupaten		dengan				Tugas Pelayanan	
	Penajam Paser Utara		Peraturan				Kesehatan.	
			Daerah No.					
			14 Thn 2017					
17	Peraturan Daerah No. 9	03	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas Pekerjaan	-	SELESAI
	Thn 2012 Tentang	September	Berlaku)	berlaku.		Umum		
	Retribusi Izin Mendirikan	2012	Dicabut					
	Bangunan		dengan					
			Peraturan					
			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
18	Peraturan Daerah No. 8	03	Berlaku	Berdasarkan peraturan	PERDA perlu segera	Dinas Pekerjaan	-	BELUM PROSES
	Thn 2012 Tentang Izin	September		perundang-undangan istilah	diganti	Umum		
	Mendirikan Bangunan	2012		Izin Mendirikan Bangunan				
				sudah diganti dengan				
				Persetujuan Bangunan				
				Gedung (PBG)				
19	Peraturan Daerah No. 7	03	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas	-	SELESAI
	Thn 2012 Tentang	September	Berlaku)	berlaku.		Perhubungan,		
	Retribusi Pengendalian	2012	Dicabut			Kebudayaan dan		
	Menara Telekomunikasi		dengan			Pariwisata		
			Peraturan					
			Daerah No. 1					
			Thn 2024					
20	Peraturan Daerah No. 6	03	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan	Menetapkan PERBUP	Dinas	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
	Thn 2012 Tentang Menara	-		sebaga berikut:		Perhubungan,		
	Telekomunikasi	2012		a) Pasal 5 ayat (2): Rencana	pelaksanaan PERDA.	Kebudayaan dan		
				Induk Menara		Pariwisata		
				Telekomunikasi ditetapkan				
				dengan Peraturan Bupati				
				setelah dikonsultasikan				
				dengan DPRD.				
				b) Pasal 28 ayat (4): Tata				
				Cara pelaporan kelaikan				
				fungsi bangunan menara				
				Tarigai barigarian menara				

			diatur dengan Peraturan Bupati.  c) Pasal 40 ayat (7):    Ketentuan mengenai prosedur relokasi dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. dan d) Pasal 41: Hal yang belum diatur ditetapkan dengan PERBUP.				
Peraturan Daerah No. 5 Thn 2012 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2012	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	_	Dinas Pendapatan Daerah	_	SELESAI
Thn 2012 Tentang		(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Pendapatan Daerah		SELESAI
Peraturan Daerah No. 3 Thn 2012 Tentang Izin Usaha Perdagangan	30 Juli 2012		Perlu Evaluasi	Perlu Evaluasi	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	-	BELUM SELESAI
Peraturan Daerah No. 2 Thn 2012 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh Dan Wakaf	30 Juli 2012	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 Ayat	yang mengatur teknis pelaksanaan PERDA.	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	BELUM DIAJUKAN	BELUM SELESAI

25	Peraturan Daerah No. 1	19 April	(Tidak	(4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 21, Pasal 29, Pasal 32 dan Pasal 45.	Menerbitkan PERBUP ttg	Badan	TIDAK ADA PENGAJUAN	DELLIM SELESAL
	Thn 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025	2012	Berlaku) Dicabut dengan Peraturan	PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP ttg Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat 2)	Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD diatur	Perencana	TIDAK ADA FENGAJUAN	BELUIVI SELESAI
lahu	<u>In 2013</u>	140	H-115			b :		loet eo a :
1	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 deee	18 November 2013	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah		SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2013 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012	15 November 2013	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	_	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam	07 November 2013	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah		SELESAI

Pa	aser Utara							
4 Pe Th Tu Da Ke	eraturan Daerah No. 5	September		PERDA ini mengamanatkan untuk membuat PERBUP sebagai teknis pelaksanaan pada:  a) Pasal 35 ayat (3):   Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan diatur dalam Peraturan Bupati. b) Pasal 37 ayat (3):   Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Sekretariat Majelis Pertimbangan diatur dalam Peraturan Bupati.	Menetapkan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan PERDA.	Keuangan Sekretariat Daerah	a) PERBUP No. 47 Thn 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah. b) PERBUP No. 24 Thn 2020 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah.	
Th Pe Mo Ka Pa Pe Mii Ka		September		PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2013.	-	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah		SELESAI
Th	nn 2013 Tentang etribusi Pelayanan Pasar		l ·	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan		SELESAI
7 Pe	eraturan Daerah No. 2	17 Juni	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Dinas	-	SELESAI

Thn 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan  Peraturan Daerah No. 1 Thn 2013 Tentang	2013 17 Juni 2013	Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 (Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; Bagian Perekonomian	SELESAI
Retribusi Izin Gangguan		Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024		Sekretariat Daerah	
hun 2014					·
Peraturan Daerah No. 13 Thn 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015	31 Desember 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 12 Thn 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	Desember	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2015.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 11 Thn 2014 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013	04 Desember 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai -daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Bagian Keuangan Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Daerah No. 10	24	Tidak Punya		Bagian -	SELESAI

	The COA A Table 1	Name of the second second	D C	DEDDA initialet		V	1
	Thn 2014 Tentang	November	Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai	<del>-</del>	Keuangan	
	33	2014		daya guna akibat telah		Sekretariat	
	Pendapatan Dan Belanja			melampaui waktu atau tahun		Daerah	
	Daerah Kabupaten			pelaksanaan kegiatan.			
	Penajam Paser Utara						
	Tahun Anggaran 2014						
5	Peraturan Daerah No. 9	29	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian -	SELESAI
	Thn 2014 Tentang	September	Berlaku)	berlaku.		Organisasi dan	
	Organisasi Dan Tata Kerja	2014	Dicabut			Tata Laksana	
	Badan Penanggulangan		dengan			Sekretariat	
	Bencana Daerah		Peraturan			Daerah	
	Kabupaten Penajam		Daerah No. 3				
	Paser Utara		Thn 2016				
6	Peraturan Daerah No. 8	29	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian -	SELESAI
	Thn 2014 Tentang	September	Berlaku)	berlaku.		Organisasi dan	
	_	2014	Dicabut			Tata Laksana	
	Peraturan Daerah Nomor		dengan			Sekretariat	
	11 Tahun 2008 Tentang		Peraturan			Daerah	
	Organisasi Dan Tata Kerja		Bupati No. 3				
	Badan Perencana		Thn 2016				
	Pembangunan Daerah						
	Inspektorat Dan Lembaga						
	Teknis Daerah Kabupaten						
	Penajam Paser Utara						
7	,	29	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	_	Bagian -	SELESAI
			Berlaku)	berlaku.		Organisasi dan	
	Perubahan Keempat Atas		Dicabut	beriaka.		Tata Laksana	
	Peraturan Daerah Nomor	[	dengan			Sekretariat	
	10 Tahun 2008 Tentang		Peraturan			Daerah	
	Organisasi Dan Tata Kerja		Daerah No. 3				
	Dinas-Dinas Daerah		Thn 2016				
	Kabupaten Penajam		1 2010				
	Paser Utara						
8		29	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	_	Bagian -	SELESAI
۲			Berlaku)	berlaku.	-	Organisasi dan	OLLLOAI
	1	2014	Dicabut	Deliaku.		Tata Laksana	
I	Peraturan Daerah Nomor	ĺ	dengan	1		Sekretariat	

	9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara		Peraturan Daerah No. 3 Thn 2016			Daerah		
				PERDA ini sudah tidak memiliki daya guna sejak terbitnya: a) PERDA No. 7 Thn 2022 ttg Sistem Perlindungan Anak; b) PERDA No. 1 Thn 2023 ttg Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.	-	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan		SELESAI
	Thn 2014 Tentang	September 2014	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencana Pembangunan Daerah	_	SELESAI
	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033	01 Juli 2014		<ul> <li>a) PERDA ini mengatur         Rencana Tata Ruang         Wilayah Kabupaten         Penajam Paser Utara         Tahun 2013-2033.</li> <li>b) Saat ini dilakukan revisi         terhadap Raperda         Rencana Tata Ruang         Wilayah Kabupaten         Penajam Paser Utara.</li> </ul>	PERDA ini seyogyanya dijabarkan dalam PERBUP yang mengatur Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).	Umum	proses pembentukan PERBUP RDTR untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Serambi Nusantara Koridor Maridan-Riko- Sepan- Sotek dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Serambi Nusantara Koridor Penajam-Petung.	SEBAGIAN SELESAI (Catatan: RDTR yuang lain masih akan diajukan)
12	Peraturan Daerah No. 2	03 Februari	Tidak Punya	PERDA ini tidak mempunyai	-	Bagian		SELESAI

	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014	2014 27 Januari		daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.		Keuangan Sekretariat Daerah Dinas		SELESAI
		2014	ľ .	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Pendapatan Daerah	-	SELESAI
1	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2015 Tentang	31 Desember 2015	Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
	Thn 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015	2015	Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		SELESAI
	Thn 2015 Tentang	11 November 2015	Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		SELESAI
	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2015 Tentang	14 September	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan	Agar menetapkan	Dinas Pekerjaan Umum	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

Bangunan Gedu	ng 2015		sebagai teknis pelaksanaan	PERBUP sebagai pedoman teknis			
Peraturan Daera Thn 2015 Tental Organisasi Dan Lembaga Lain K Penajam Paser	ng September Tata Kerja 2015 abupaten Utara	Tidak Punya Daya Guna	PERDA sekitar 46 Pasal, PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	pelaksanaan PERDA -	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah		SELESAI
Peraturan Daera Thn 2015 Tenta Kawasan Tanpa	ng September	Berlaku	pembentukan PERBUP yang	Membentuk PETBUP tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	-	BELUM SELES
Peraturan Daera Thn 2015 Tental		Berlaku	Dalam PERDA ini ada beberapa pengaturan pembentukan PERBUP, yang muatan materinya merupakan bersifat pedoman teknis PERDA yakni: a) Pasal 20 ayat (4): Kriteria dan tata cara perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan. b) Pasal 27 ayat (5): Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang- undangan.	sebagai pedoman	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2024 ttg Pengangkatan Dan Honorarium Staf Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa; b) PERBUP No. 13 Thn 2024 ttg Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; c) PERBUP No. 1 Thn 2024 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa; d) PERBUP No. 35 Thn 2023 ttg Petunjuk Teknis	Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta banyak PERMENDAGR yang terbit yang mengatur desa sehingga perlu segera disesuaikan).

	c) Pasal 40: Bentuk dan	PERMENDAGRI yang	ttg Pengelolaan Aset
	sistematika laporan	terbit yang mengatur	Desa; g) PERBUP No. 15
	penyelenggaraan	desa sehingga perlu	Thn 2022 ttg Pedoman
	Pemerintahan Desa diatur	segera disesuaikan.	Teknis Pengangkatan
	lebih lanjut dengan		Pemberhentian Dan Cuti
	Peraturan Bupati		Perangkat Desa; i)
	berpedoman pada		PERBUP No. 39 Thn 2021
	Peraturan Menteri.		ttg Pedoman Pemberian
	d) Pasal 47: Tata cara		Bantuan Keuangan
	pemberhentian Kepala		Khusus Kepada Desa; I)
	Desa diatur dengan		PERBUP No. 8 Thn 2021
	Peraturan Bupati		ttg Tata Cara
	berpedoman pada		Pengalokasian Dan
	Peraturan Menteri.		Pembagian Alokasi Dana
	e) Pasal 80: Pengadaan		Desa sebagaimana telah
	bahan, jumlah, bentuk,		diubah dua kali terakhir
	ukuran, dan warna surat		dengan PERBUP No. 13
	suara, kotak suara,		Thn 2023; n) PERBUP
	kelengkapan peralatan lain		No. 33 Thn 2020 ttg Tata
	serta pendistribusiannya		Cara Pelaksanaan
	diatur lebih lanjut dalam		Kegiatan Pengadaan
	Peraturan Bupati.		Barang/Jasa Di Desa; o)
	·		PERBUP No. 9 Thn 2020
	f) Pasal 90 ayat (4): Tata		ttg Bantuan Keuangan
	cara penetapan calon		Khusus Kepada Desa; p)
	Kepala Desa terpilih,		PERBUP No. 4 Thn 2020
	penyelesaian perselisihan		ttg Insentif Rukun
	hasil pemilihan Kepala		Tetangga
	Desa, dan penyampaian		Desa/Kelurahan; g)
	laporan hasil pemilihan		PERBUP No. 2 Thn 2020
	Kepala Desa diatur dalam		ttg Pedoman Pelaksanaan
	Peraturan Bupati.		Program Pembangunan
	g) Pasal 95: Tata cara		Pemberdayaan
	pemilihan Kepala Desa		Masyarakat Kelurahan
	antarwaktu diatur dengan		Dan Perdesaan Mandiri; r)
	Peraturan Bupati		PERBUP No. 35 Thn 2019
	berpedoman pada		ttg Pedoman Pengelolaan
ı l l	1 1	I	rig i dadinan i dhigololaan

	Dovoturon Montori	Drawn ma Kanan disdistra
	Peraturan Menteri.	Program Kependudukan
	h) Pasal 108: Ketentuan lebih	Keluarga Berencana Dan
	lanjut mengenai	Pembangunan Keluarga
	pengangkatan dan	Di Desa; s) PERBUP No.
	pemberhentian Perangkat	30 Thn 2019 ttg Badan
	Desa diatur dengan	Permusyawaratan Desa
	Peraturan Bupati	sebagaimana telah diubah
	berpedoman pada	dengan PERBUP No. 34
	Peraturan Menteri.	Thn 2020; t) PERBUP No.
	i) Pasal 109 ayat (2): Tata	7 Thn 2019 ttg
	cara mengenai	Pengelolaan Keuangan
	penggunaan pakaian	Desa sebagaimana telah
	dinas dan atribut	diubah dengan PERBUP
	sebagaimana dimaksud	No. 16 Thn 2021; u)
	pada ayat (1) diatur	PERBUP No. 4 Thn 2019
	dengan Peraturan Bupati	ttg Daftar Kewenangan
	berpedoman pada	Desa Berdasarkan Hak
	Peraturan Menteri.	Asal Usul Dan
	j) Pasal 121 ayat (7) Tata	Kewenangan Lokal
	cara penyelesaian	Berskala Desa; p)
	perselisihan hasil	PERBUP No. 19 Thn 2018
	pemilihan Anggota BPD	ttg Pedoman Pendirian,
	diatur dalam Peraturan	Pengurusan, Pengelolaan,
	Bupati.	Pendanaan, Pembubaran,
		Pembinaan Dan
	k) Pasal 125: Pengaturan	Pengawasan Badan
	lebih lanjut mengenai tata	Usaha Milik Desa; w)
	tertib BPD diatur dengan	PERBUP No. 2 Thn 2018
	Peraturan Bupati	ttg Susunan Organisasi
	berpedoman pada	Dan Tata Kerja
	Peraturan Menteri.	Pemerintah Desa; x)
	l) Pasal 127 ayat (5): Tata	PERBUP No. 55 Thn 2017
	cara mengenai tata tertib	ttg Program Pembiayaan
	dan pengambilan	Pembangunan
	keputusan musyawarah	Infrastruktur Desa; dan y)
	Desa diatur dengan	PERBUP No. 15 Thn 2017
	Peraturan Bupati	ttg Pedoman Tata Cara
1 1	I I	rig i odoman rata odra

		<u> </u>
	berpedoman pada	Pemilihan Kepala Desa
	Peraturan Menteri.	sebagaimana telah diubah
	l) Pasal 129: Besaran	dengan PERBUP No. 32
	tunjangan dan penerimaan	Thn 2021.
	lain yang sah ditetapkan	
	dengan Peraturan Bupati.	
	m) Ketentuan lebih lanjut	
	mengenai tata cara	
	penyusunan peraturan di	
	desa dan Keputusan	
	Kepala Desa diatur dalam	
	Peraturan Bupati	
	berpedoman pada	
	Peraturan Menteri.	
	n) Pasal 139 : Pasal Petunjuk	
	teknis penyusunan RPJM	
	Desa dan RKP Desa serta	
	petunjuk teknis	
	pelaksanaan kegiatan	
	pembangunan Desa lebih	
	lanjut diatur dengan	
	Peraturan Bupati.	
	o) Pasal 140 ayat (6):	
	Ketentuan lebih lanjut	
	mengenai pendirian,	
	pengurusan, pengelolaan,	
	Pendanaan, Pembubaran,	
	Pembinaan dan	
	Pengawasan BUM Desa	
	diatur dalam Peraturan	
	Bupati berpedoman pada	
	Peraturan Menteri.	
	p) Pasal 147 : Ketentuan	
	lebih lanjut mengenai	
	kerjasama Desa diatur	
	dengan Peraturan Bupati	
ı l		

Tahun 2016		berpedoman pada Peraturan Menteri.  q) Pasal 148 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.  r) Pasal 149 ayat (2): Tata cara pembentukan lembaga adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.  s) Pasal 157: Lembaga kemasyarakatan Desa yang sudah ada masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya lembaga kemasyarakatan Desa yang baru berdasarkan peraturan t)Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.  t) Pengaturan Desa Persiapan dalam bentuk Peraturan Buapti juga ada sepanjang ada pengusulan pembentukan.				
1 1	15 Berlaku Desember 2016	PERDA ini mengamanatkan PERBUP yang mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,	Menerbitkan PERBUP yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setretariat	a) PERBUP No. 22 Thn 2017 sampai dengan PERBUP No. 54 Thn 2027 (33 PERBUP). b)PERBUP	SELESAI

	Daerah			susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 4).	fungsi, serta tata kerja sebagai pelaksanaan PERDA.	Daerah	No. 36 Thn 2019 (mengubah PERBUP 22 Thn 2017);	
	Peraturan Daerah No. 2 Thn 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016	05 Desember 2016	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	29 November 2016	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	SELESAI
1	n 2017 Peraturan Daerah No. 21 Thn 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018		Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	-	SELESAI
2		22 November 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 64 Thn 2017 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017.	

3		21 November 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 18 Thn 2017 Tentang Izin	21 November 2017	Berlaku	Dalam PERDA mengamanatkan Pembentukan PERBUP dengan perintah 3 materi Pasal.	Perlu menetapkan PERBUP sebagai pedoman pelaksanaan.	Bagian Pemerintahan (Inisiatif DPRD)	-	BELUM SELESAI
5	Peraturan Daerah No. 17 Thn 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara	November		a) PERDA ini mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur pembentukan asosiasi pengusahaan sarang burung Walet di Daerah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi pengusahaan sarang burung walet sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati. b) Kebutuhan atas keberadaan PERBUP diatas, karena dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pemegang izin (Pengelolaan Dan	Menetapkan PERBUP sebagai pelaksanaan PERDA.	Dinas Peternakan	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

,	21 November 2017	Berlaku	Pengusahaan Sarang Burung Walet) diwajibkan terdaftar sebagai anggota asosiasi pengusahaan sarang burung Walet di Daerah.	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	-	SELESAI
Peraturan Daerah No. 15 Thn 2017 Tentang	21 November 2017	Berlaku	PERDA mengamanatkan pada: Pasal 9 ayat (2) bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengajuan pemberian nama Jalan dan perubahan nama Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.	Agar menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Teknis Pemberian Nama Jalan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
Peraturan Daerah No. 14 Thn 2017 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah	21 November 2017	Berlaku	pembentukan PERBUP pada: Pasal 5 ayat (3) Ketentuan mengenai perencanaan, proses pendaftaran,	Agar menetapkan PERBUP yang mengatur Pertunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dengan menyesuaikan program nasional di bidang kesehatan.		PERBUP No. 18 Thn 2019 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah.	SELESAI
Peraturan Daerah No. 13 Thn 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka	November	Berlaku	Perlu dilakukan perkuatan Regulasi Pelaksanan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada		Sekretariat		SELESAI (Catatan: Mengavaluasi Regulasi Secara Komprehensip

				berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan.	Benuo Taka Energi		Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha	dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh
	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2017 Tentang Penyelenggaraan Agribisnis Dan Agroindustri	21 November 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan dengan 5 Pasal untuk membentuk PERBUP pada: Pasal 33, Pasal 43 ayat (4), Pasal 52 ayat (4), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 57.	Agar Menetapkan PERBUP yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Agribisnis Dan Agroindustri.	Dinas Pertanian (Inisatif DPRD)	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2017 Tentang Kepelabuhanan	21 November 2017	Berlaku		Agar dapat membertuk PERBUP yang mngatur Pedoman teknis PERDA.	Dinas Perhubungan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

	<u> </u>		<del></del>
	untuk penyelenggaraan		
	pelabuhan		
	diatur dengan Peraturan		
	Bupati.		
	c) Pasal ayat (4) dan ayat		
	(5): Ketentuan mengenai		
	Rencana Induk Pelabuhan		
	ditetapkan dengan		
	Peraturan		
	Bupati.		
	(5) Ketentuan mengenai		
	Rencana Induk Pelabuhan		
	ditetapkan dengan Peraturan		
	Bupati dsan Ketentuan		
	mengenai persyaratan		
	penetapan Rencana Induk		
	Pelabuhan diatur dalam		
	Peraturan Bupati.		
	d) Pasal 13: Ketentuan		
	mengenai Daerah		
	Lingkungan Kerja dan		
	Daerah Lingkungan		
	Kepentingan untuk		
	penyelenggaraan Pelabuhan		
	ditetapkan dengan Peraturan		
	Bupati.		
	e) Pembentukan Dewan		
	Kelautan Kabupaten diatur		
	dengan Peraturan Bupati		
	(bersifat pilihan).		
12 Peraturan Daerah No. 10 21	Berlaku a) PERDA No. 10 Thn 2017	a) Menyarankan untuk Dinas	BELUM SELESAI
Thn 2017 Tentang November	ttg Perubahan Atas	melakukan evaluasi Kependudukan	
Perubahan Atas Peraturan 2017	Peraturan Daerah Nomor	Materi PERDA apakah dan Pencatatan	
Daerah Nomor 17 Tahun	17 Tahun 2007 Tentang	ada yang bertentangan Sipil	
2007 Tentang	Penyelenggaraan	dengan Peraturan	
Penyelenggaraan	I I		

	Administrasi		Administrasi	perundang-undangan			
	Administrasi Kependudukan		Kependudukan, memuat 10 Pasal yang memerintahkan pembentukan PERBUP termasuk yang ada dalam PERDA awal. c) Telah Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 20i3 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi	yang lebih tinggi, b) Menyarankan membentuk PERBUP yang mengatur Pedoman teknis PERDA.			
13		21 November 2017	Kependudukan. PERDA mengamanatkan Pelaksanaan Penyertaan Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2017.	-	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	SELESAI
14	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2017 Tentang	01 November 2017	PERDA ini mengamanat Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (8), Pasal 33 ayat (4), Pasal 37 ayat (4),	PERDA.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Inisiatif DPRD)	TIDAK ADA PENGAJUAN RAPERBUP	BELUM SELESAI

	Thn 2017 Tentang	September		Pelaksanaan Penyertaan		Perekonomian		
<del></del>	Peraturan Daerah No. 6		Berlaku	PERDA mengamanatkan		Bagian	Dan Anggota DPRD Kab PPU. -	SELESAI
							Administratif Pimpinan	
							Hak Keuangan Dan	
							Thn 2017 ttg Pelaksanaan	
							PPU. d) PERBUP No. 61	
							Dan Anggota DPRD Kab	
							Administratif Pimpinan	
							Keuangan Dan	
							Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak	
							Atas PERBUP No. 61	
							Thn 2018 ttg Perubahan	
							PPU. c) PERBUP No. 4	
							Dan Anggota DPRD Kab	
							Administratif Pimpinan	
							Keuangan Dan	
							Pelaksanaan Hak	
							61 Tahun 2017 tentang	
							Kedua Atas PERBUP No.	
							Thn 2021 ttg Perubahan	
							PPU. b) PERBUP No. 36	
	Paser Utara						Dan Anggota DPRD Kab	
	Kabupaten Penajam			Pasal 24 ayat (3).			Administratif Pimpinan	
	Perwakilan Rakyat Daerah			ayat (4), Pasal 23 ayat (5),			Keuangan Dan	
	Dan Anggota Dewan			Pasal 17 ayat (6), Pasal 18			Pelaksanaan Hak	
	Administratif Pimpinan			pada: Pasal 12 ayat (3),			61 Tahun 2017 tentang	
	Keuangan Dan			mengatur teknis pelaksanaan			Ketiga Atas PERBUP No.	
	Thn 2017 Tentang Hak	2017		Pembentukan PERBUP yang			2024 ttg Perubahan	
	Peraturan Daerah No. 7	12 Oktober		, ,	Menetapkan PERBUP ttg	Badan Keuangan	a) PERBUP No. 12 Thn	SELESAI
				56 ayat (3).				
				Pasal 55 ayat (3), dan Pasal				
				Pasal 44 ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 54 ayat (3),				

	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum			Modal dengan menggunakan Penganggaran APBD TA 2017.		Sekretariat Daerah		
17	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	11 September 2017	Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Keuangan		SELESAI
18	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2017 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	29 Agustus 2017	Berlaku	PERDA mengamanatkan Pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada Pasal 6 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (5), Pasal 31, Pasal 39 ayat (4), Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 49.	Pedoman Teknis Pelaksanaan PERDA.	•	2025 ttg Bela dan Beli	BELUM SELESAI
19	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan	29 Agustus 2017	Berlaku	PERDA ini mengamanatkan pembentukan PERBUP yang mengatur teknis pelaksanaan pada: Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (3)	,	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	a) PERBUP No. 16 Thn 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang PengeiOlaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.(Berlaku) b) PERBUP No. 15 Thn 2020	SELESAI

						ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.(Tidak Berlaku-dicabut dengan PERBUP No. 16 Thn 2023)	
	29 Agustus 2017	Berlaku	Pembentukan PERBUP terhadap Kegiatan Pelestarian berupa Hasil Inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan(Pasal	a) Membentukan PERBUP terhadap Hasil Inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan. b) Pembentukan PERBUP dilaksanakan apabila ada usulan dari Lembaga Adat Paser.	Dinas Kebudayaan dan	,	SELESAI
	07 Februari 2017	Tidak Punya Daya Guna	<ul> <li>a) Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 6).</li> <li>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	-		a) PERBUP No. 3 Thn 2017 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017. b) PERBUP No. 8 Thn 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja	SELESAI

Tobi	m 2040						Daerah Tahun Anggaran 2017.	
1	Peraturan Daerah No. 14 Thn 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019	Desember 2018	Tidak Punya Daya Guna	Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 6) b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.			PERBUP No. 44 Thn 2018 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	
2	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	08 November 2018	Tidak Punya Daya Guna	<ul> <li>a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 12).</li> <li>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>			PERBUP No. 33 Thn 2018 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.	SELESAI
3	Peraturan Daerah No. 12 Thn 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan	September	Berlaku	· •	a) Perlu menetapkan PERBUP yang mengatur pertunjuk pelaksanaan PERDA, walaupu ada beberapa PERBUP yang	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a) PERBUP No. 32 Thn 2018 ttg Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah. b) PERBUP No. 16 Thn 2020	BELUM SELESA

	Pendidikan		Pasal yang mengatur ketentuan Pembentukan PERBUP.	diterbitkan tetapi sebagaian besar amanat PERDA menjadi muatan dalam pengaturan PERBUP. b) PERDA ini secara umum disusun berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU ini masih berlaku, namun demikian perlu dilakukan evaluasi terkait regulasi baru sebagai penjabaran UU Sikdiknas tersebut. c) Berdasarkan hal tersebut diatas sangat terbuka untuk dilakukan Penyempurnaan PERDA atau Pembentukan PERDA yang sesuai dengan	ttg Penyelenggaraan Pendidikan Gratis. (Mencabut PERBUP No. 18 Thn 2012). c) PERBUP No. 19 Thn 2020 ttg Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. d) PERBUP No. 54 Thn 2020 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.	
4	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	28 Agustus 2018	18 Pasal yang mengatur pembentukan PERBUP. b) Seiring dengan terbitnya		 2024 ttg Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah. b) PERBUP No. 48 Thn 2020 ttg Pengamanan Dan	muatan PERDA

5	Peraturan Daerah No. 10	28 Agustus	Negeri (PERMENDAGRI) yang menjadi Dasar Hukum utama pembentukan Peraturan Daerah ini, sehingga ada beberapa pengaturan yang perlu disempurnakan. c) PP 24 Tahun 2014 Pasal 105: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. PERDA ini mengamanatkan		, ,	Pelaksanaan PERDA)
	Thn 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	2018	pembentukan PERBUP dalam 3 muatan Pasal yakni: a) padsa Pasal 12 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan rincian kegiatan dalam	PERBUP sebagai Pelaksanaan PERDA khususnya pada perintah Pasal 12, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4). b) Pembentukan PERBUP berdasarkan PERDA dapat disusun dalam beberapa PERBUP sesuai kebutuhan dan kemudahan dalam penerapan di Daerah.	Thn 2025 telah tertuang	(Catatan: Dokumen Tidak Lengkap)

				dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.			
	Thn 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	28 Agustus 2018		mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD)	BELUM SELESA
			l`	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Kesehatan -	SELESAI
		2018	l`	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Badan Keuangan	SELESAI
			L	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	RSUD -	SELESAI
0		08 Juni	(Tidak	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan	SELESAI

11		08 Juni 2018	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 6 Thn 2018 (Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan	-	SELESAI
12		08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	SELESAI
13		08 Juni 2018	(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dar Perdagangan		SELESAI
14		25 April 2018	Berlaku	Belum Ada Pedoman Teknis Tata Cara Penyertaan Modal Daerah	Agar segera menyusun Raperbup Pedoman Teknis	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	-	BELUM ADA
Tahu 1	Thn 2019 Tentang	27 Desember 2019	Tidak Punya Daya Guna	a) Berdasarkan PERDA ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang	Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Badan Keuangan	PERBUP No. 38 Thn 2019 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten	SELESAI

Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020			Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal 9). b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.		Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.	
Peraturan Daerah No. 19 Thn 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara	Desember 2019		Belum Ada Pedoman Teknis Tata Cara Penyertaan Modal Daerah	Agar segera menyusun Raperbup Pedoman Teknis	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah		BELUM ADA
	21 Agustus 2019	Tidak Punya Daya Guna	<ul> <li>a) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 6).</li> <li>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.		PERBUP No. 20 Thn 2019 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019.	
	21 Agustus 2019	Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-		PERBUP No. 19 Thn 2019 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	SELESAI

	Daerah Tahun Anggaran					Daerah Tahun Anggaran	
<u> </u>	2018	\ <u></u>				2019.	0=1=0.1
5	Peraturan Daerah No. 16 07 Mei 2019	l` .	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian Hukum	-	SELESAI
	Thn 2019 Tentang	1	berlaku.		Sekretariat		
	Perubahan Atas Peraturan	Dicabut			Daerah		
	Daerah Nomor 12 Tahun	dengan					
	2011 Tentang Retribusi	Peraturan					
	Rumah Potong Hewan	Daerah No. 1					
		Thn 2024					
6	Peraturan Daerah No. 15 07 Mei 2019	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian Hukum	-	SELESAI
	Thn 2019 Tentang	Berlaku)	berlaku.		Sekretariat		
	Perubahan Atas Peraturan	Dicabut			Daerah		
	Daerah Nomor 20 Tahun	dengan					
	2011 Tentang Pajak	Peraturan					
	Reklame	Daerah No. 1					
		Thn 2024					
7	Peraturan Daerah No. 14 07 Mei 2019	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian Hukum	-	SELESAI
	Thn 2019 Tentang	Berlaku)	berlaku.		Sekretariat		
	Perubahan Atas Peraturan	Dicabut			Daerah		
	Daerah Nomor 13 Tahun	dengan					
	2011 Tentang Retribusi	Peraturan					
	Izin Trayek	Daerah No. 1					
		Thn 2024					
8	Peraturan Daerah No. 13 07 Mei 2019	(Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian Hukum	-	SELESAI
	Thn 2019 Tentang	Berlaku)	berlaku.		Sekretariat		
	Perubahan Atas Peraturan	Dicabut			Daerah		
	Daerah Nomor 9 Tahun	dengan					
	2011 Tentang Pajak	Peraturan					
	Restoran	Daerah No. 1					
		Thn 2024					
9	Peraturan Daerah No. 12 07 Mei 2019	Tidak	PERDA ini sudah tidak	-	Bagian Hukum	-	SELESAI
	Thn 2019 Tentang	Berlaku)	berlaku.		Sekretariat		
	Perubahan Atas Peraturan	Dicabut			Daerah		
	Daerah Nomor 19 Tahun	dengan					
	2011 Tentang Pajak	Peraturan					
	Penerangan Jalan	Daerah No. 1					
		Thn 2024					

Peraturan Dad Thn 2019 Ten Perubahan At Daerah Nomo 2011 Tentang	as Peraturan or 18 Tahun	19(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SELESAI
Thn 2019 Ten Perubahan Ke Peraturan Dae 10 Tahun 201 Pajak Bumi D Bangunan Pe Perkotaan	edua Atas erah Nomor 1 Tentang an rdesaan Dan	19(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Dad Thn 2019 Ten Perubahan At Daerah Nomo 2013 Tentang Izin Gangguai	ntang as Peraturan or 1 Tahun ı Retribusi	19(Tidak Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SELESAI
Peraturan Dao Thn 2019 Ten Perubahan At Daerah Nomo 2011 Tentang	ntang as Peraturan or 8 Tahun		PERDA ini sudah tidak berlaku.	Badan Pendapatan Derah	SELESAI
Peraturan Dad Thn 2019 Ten Perubahan At Daerah Nomo 2012 Tentang Mineral Bukar Batuan	as Peraturan or 5 Tahun ı Pajak		PERDA ini sudah tidak berlaku.	Badan Pendapatan Derah	SELESAI
15 Peraturan Da	erah No. 6 07 Mei 20			Badan -	SELESAI

	Perubahan Atas Peraturan		Dicabut					
19		29 April 2019	(Tidak Berlaku)	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Perhubungan		SELESAI
18	Thn 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penajam Benuo Taka Energi	2019 <sup>-</sup>		Regulasi Pelaksanan (Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang seyogyanya disempurnakan dalam rangka memayungi operasional dan kinerja perusahaan.	Benuo Taka Energi	Sekretariat Daerah	2021 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah. 2) PERBUP No. 28 Thn 2022 ttg Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.	dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi Permerintah Daerah dengan Penetapan oleh Kepala Daerah)
17	Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		Berlaku) Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024	PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		SELESAI
16	Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah  Peraturan Daerah No. 5 Thn 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	07 Mei 2019	Dicabut dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 (Tidak	PERDA ini sudah tidak berlaku. PERDA ini sudah tidak berlaku.	-	Pendapatan Derah Dinas Komunikasi dan Informatika	-	SELESAI

20	Thn 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023	18 Maret 2019	dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 Tidak Punya Daya Guna	PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	_	SELESAI
Tahu	un 2020							
1	Thn 2020 Tentang	30 Desember 2020	Tidak Punya Daya Guna	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja	, .	dan Aset Daerah	Perbup 55 Thn 2020 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.	SELESAI
2	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka	21 Desember 2020	Berlaku	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang termuat dalam Lampiran disebutkan bahwa: a) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi pelaksanaan investasi, penganggaran,	1 2 3 1 - 7	Perekonomian Sekretariat Daerah/BKAD	Rancangan PERBUP ttg Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang masih penyempurnaan bersama BKAD/Bagian Perekonomian Setkab.	DALAM PROSES

Thn 2020 Penyertaa Pemerinta Perusaha	D Tentang an Modal tah Daerah Pada aan Umum Penajam Benuo	21 Desember 2020			Menetapkan PERBUP ttg Pengelolaan penyertaan modal daerah.	Perekonomian Sekretariat Daerah	Rancangan PERBUP ttg Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang masih penyempurnaan bersama BKAD/Bagian Perekonomian Setkab.	DALAM PROSES	
--	---	------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---	--------------	--

- F C			Tidak Punya Daya Guna	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional	Menetapkan PERBUP ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020.	dan Aset Daerah	1) Perbup 42 Thn 2020 ttg Pejabaran APBD TA 2020; 2) Perbup 51 Thn 2020_(Perubahan I Penjabaran APBD TA 2020) 3) Perbup 52 Thn 2020_(Perubahan II Penjabaran APBD TA 2020)	SELESAI
- F F	Thn 2020 Tentang	21 September 2020	Tidak Punya Daya Guna	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Pasal 12).	Penjabaran	dan Aset Daerah		SELESAI
-  -		14 April 2020	Berlaku	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 mengamanatkan pada Pembentukan		Sekretariat	) PERBUP No. 29 Thn 2020 ttg Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Danum Taka.	SELESAI

h 21 / 1	1	I. 5	6) 252212 11 66 71
Minum Kabupaten		dan Peraturan Menteri	2) PERBUP No. 39 Thn
Penajam Paser Utara	* ` ''	terkait.	2020 ttg Penghasilan
Menjadi Perusahaan	Ayat (6), Pasal 42 ayat (4),		KPM, Direksi, Dewan
Umum Daerah Air Minum	Pasal 54 ayat (6), Pasal 58		Pengawas Dan
Danum Taka	ayat (2), Pasal 67 ayat (3),		Sekretariat Dewan
	dan Pasal 71 ayat (2).		Pengawas Perusahaan
			Umum Daerah Air Minum
			Danum Taka. 3) PERBUP
			No. 20 Thn 2021 ttg
			Rencana Aksi Daerah
			Penyediaan Air Minum
			Dan Penyehatan
			Lingkungan Tahun
			2019-2023. 4) PERBUP
			No. 35 Thn 2021 ttg
			Struktur Organisasi Dan
			Tata Kerja Perusahaan
			Umum Daerah Air Minum
			Danum Taka. 5) PERBUP
			No. 40 Thn 2021 ttg
			Penugasan Kepada
			Perusahaan Umum
			Daerah Air Minum Danum
			Taka Untuk Membangun
			Kerjasama Pengelolaan
			Jaringan Gas Dengan
			Badan Usaha
			Pengelolaan Jaringan
			Gas. 6) PERBUP No. 45
			Thn 2022 ttg Tarif Air
			Minum Pada Perusahaan
			Umum Daerah Air Minum
			Danum Taka. (PERBUP
			ini mencabut PERBUP
			PERBUP No. 29 Thn
			2020). 7) PERBUP No. 27
			Thn 2024 ttg Kedudukan,

	30 Januari 2020		dan/atau Peraturan Kepala Daerah) baik yang belum ada	komprehensip regulasi turunan dalam rangka pelaksaan tugas dan wewenang Perumda Benuo Taka	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Direksi Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah. 3) PERBUP No. 22 Thn 2024 ttg Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Untuk Penyediaan Infrastruktur Dan Pengadaan Barang/Jasa Yang Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Dan	dalam operasional dan kinerja Perumda yang menjadi kewenangan Permerintah Daerah dengan
	2020	Berlaku	a) Penetapan PERDA ini merupakan bagian dari evaluasi Perangkat Daerah evaluasi kinerja Organisasi PERANGKAT DAERAH sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan yang menjadi	tetap melakukan evaluasi terhadap Organisasi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Pemindahan Ibu Kota Negara.  1) PERBUP No. 10 Thn 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2) PERBUP No. 11 Thn 2020 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,	SELESAI

kewenangan dalam	urusan yang menjadi	Fungsi, Dan Tata Kerja
Pemerintah Kabupaten;.	kewenangan	Badan Keuangan Dan
b) Agar evaluasi kinerja	Pemerintah Kabupaten	Aset Daerah Kabupaten
Organisasi PERANGKAT	dapat terlaksana	Penajam Paser Utara. 3)
DAERAH sesuai dengan	dengan baik.	PERBUP No. 23 Thn 2021
	o) Melakukan	ttg Pembentukan
Pusat dan tugas dan	penyesuaian	Kedudukan Susunan
tanggungjawab menjadi	penjabaran PERDA	Organisasi Tugas Dan
berada di Bagian ORTALA	melalui	Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah	penyempurnaan	Rumah Sakit Umum
	regulasi turunannya.	Daerah Sepaku. 4)
	. ogalasi taranannya.	PERBUP No. 7 Thn 2023
		ttg Pembentukan
		Kedudukan Susunan
		Organisasi Tugas Dan
		Fungsi Serta Tata Kerja
		Unit Pelaksana Teknis
		Daerah Perlindungan
		Perempuan Dan Anak
		Pada Dinas
		Permberdayaan
		Perempuan Dan
		Perlindungan Anak
		Pengendalian Penduduk
		Dan Keluarga Berencana
		Kabupaten Penajam
		Paser Utara. 5) PERBUP
		No. 3 Thn 2024 ttg
		Perubahan Kedua Atas
		Peraturan Bupati Nomor 3
		Tahun 2011 tentang
		Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
		Pusat Kesehatan
		Masyarakat Pada Dinas
		Kesehatan Kabupaten
		Penajam Paser Utara.

Tahu	ın 2021							
1		21 Juni 2021	Berlaku	Peraturan Bupati (Peraturan Pelasksanaan) sesuai Pasal	Menyusun Perbup yang mengatur Pedoman/Teknis Pelaksanaan dari Peraturan Derah.			,
2		22 Juni 2021	Berlaku	1 \	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Peraturan Derah	1	RAPERBUP ttg	BELUM PROSES / DOKUMEN BELUM LENGKAP
3		22 Juni 2021	Berlaku	Memerintahkan Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelasksanaan) sesuai Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (5)	Menyusun Pedoman Pelaksanaan Peraturan Derah	Kebudayaan dan	RAPERBUP ke Bagian Hukum.	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
4		22 Juni 2021	Berlaku	1) Memerintahka n Penyusunan Peraturan Bupati (Peraturan Pelasksanaan	<ul> <li>a) Menetapkan Perbup sebagai Pedoman teknis</li> <li>Penyelenggaraan Bantuan Hukum.</li> <li>b) Pemerintah Daerah</li> </ul>	Daerah (Inisiatif DPRD)	1) Perbup No. 12 Thn 2023_Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 2. Dalam DPA sudah teranggarkan Anggaran Bantuan	

				) sesuai Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (3); 2) Mengatur Kewajiban Pemerintah Dareah meng anggarkan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD.	menganggarkan Anggaran Bantuan Hukum setiap Tahun dalam APBD. c) Menuangkan Standar Bantuan Hukum dalam Perbup yang mengatur Standar Satuan Harga Daerah.		Hukum. 3) Standar Satuan Harga Daerh sudah memuat Standar Bantuan Hukum.	
Tah	un 2022							
1	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022-2024	September 2022	Daya Guna	dan Pematauan RPIK/Pedoman Pelaksanaan (Pasal 9)	Menetapkan: Perbup Tata Cara Evaluasi dan Pematauan RPIK/Pedoman Pelaksanaan		RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
2	Peraturan Daerah No. 11 Thn 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022		Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD (Pasal I0).	Perubahan APBD TA 2022.	dan Aset Daerah	Perbup 32 Thn 2022 ttg Pejabaran Perubahan APBD TA 2022	SELESAI

				b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.				
3	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	21 September 2022	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati Penajam Paser Utara menetapkan Peraturan Kepaia Daerah tentang penjabaran	Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	dan Aset Daerah	Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.	SELESAI
4	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2022 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim Anak Piatu Dan Anak Yatim Piatu	20 Juli 2022		Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial mengordinir Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Yatim Anak Piatu Dan Anak Yatim	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan	(Inisiatif DPRD)	RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
5	Peraturan Daerah No. 8 Thn 2022 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah	20 Juli 2022	Berlaku	a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 28 ayat (3), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 24 Ayat	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang akan menggantikan PERBUP No. 19 Thn	Pamong Praja	Telah diajukan Judul RAPERBUP ttg Rencana Pembentukan Sekretariat Penyidik Pega.wai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten	LENGKAP

			Pasal 28 Ayat (3), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan. b) Sebelum Perda ini ditetapkan telah diatur PERBUP No. 19 Thn 2016 ttg Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.			Penajam Paser Utara dalam PROPEMPERBUP Thn 2025.	
	Peraturan Daerah No. 7 Thn 2022 Tentang Sistem Perlindungan Anak	20 Juli 2022 i		Pelaksanaan Kegiatan	Pemberdayaan	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2022 Tentang	20 Juli 2022 l	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022	Perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Teknis		Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian	BELUM PROSES/ TIDAK

	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2022-2027			Pasal 18 ayat (4) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pemberian Insentif dan disinsentif Pembangunan Fasilitas Kepariwisataan	khususnya terkait Pemberian Insentif dan disinsentif Pembangunan	Pariwisata	Hukum	ADA PENGAJUAN
	Peraturan Daerah No. 5 Thn 2022 Tentang Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	20 Juli 2022	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 22 ayat (3), Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pengaturan Dokumen Perencanaan Limbah B3	Pelaksanaan Kegiatan khususnya terkait Pengaturan Dokumen Perencanaan Limbah B3	Lingkungan	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
- I	Peraturan Daerah No. 4 Thn 2022 Tentang Paguyuban Suku Dan Budaya	20 Juli 2022	Berlaku	Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4), Pemerintah Daerah	, ,	Kebudayaan dan	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN
(	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	20 Juli 2022		Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (2) Pemerintah Daerah perlu menetapkan Perbup sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan	Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan	Pangan	Perbup 14 Thn 2023 ttg Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	SELESAI
11	Peraturan Daerah No. 2	25 Januari	Tidak Punya	a) Berdasarkan Peraturan	-	Badan Keuangan	PERBUP No. 3 Thn 2022	SELESAI

Thn 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022	2022	Daya Guna	Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Bupati Menetapkan Perkada Penjabaran APBD. b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.			ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.	
Thn 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	25 Januari 2022	Tidak Punya Daya Guna	a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Bupati Menetapkan Perkada Penjabaran Perubahan APBD. b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.	-	dan Aset Daerah	1	SELESAI
 n 2023							
Thn 2023 Tentang	28 Desember 2023	Tidak Punya Daya Guna	<ul> <li>a) Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18).</li> <li>b) PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025	dan Aset Daerah	PERBUP No. 36 Thn 2023 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.	SELESAI
	18 Oktober 2023	Tidak Punya Daya Guna	a) Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2023.	dan Aset Daerah	PERBUP No. 28 Thn 2023 ttg Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	SELESAI

			b)	10). PERDA ini tidak mempunyai daya guna akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.				
Peraturan Daerah No. 7 Thn 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	21 Agustus 2023	Tidak Punya Daya Guna	a)	tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11).	tentang Pertanggungjabawan Pelaksanan APBD TA 2022.	dan Aset Daerah	PERBUP No. 20 Thn 2023 ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.	SELESAI
				akibat telah melampaui waktu atau tahun pelaksanaan kegiatan.				
Peraturan Daerah No. 6 Thn 2023 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah	18 April 2023	Berlaku	a)	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi	Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERDA yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 47 dan materi Pasal lainnya sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Komunikasi dan Informatika	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN

			diakses oleh setiap orang diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 20). b) Standar layanan informasi publik yang antara lain memuat Tata cara memperoleh Informasi Publik ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 22). c) Tata Cara pengajuan keberatan (Sengketa Informasi) secara tertulis kepada atasan PPID diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 47).				
Peraturan Daerah No. 5 Thn 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas	18 April 2023	Berlaku	PERDA mengamanatkan	yakni:  1 PERBUP ) yang mengatur khusus Rencana Aksi Daerah Pelindungan Penyandang Disabilitas.	Dinas Sosial (Inisiatif DPRD)	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN

SLB diatur dalam	tertuang
Peraturan Bupati (Pasal	dalam
20).	PERDA
d) PERBUP ttg Ketentuan	sebagai
lebih lanjut mengenai	petunjuk
pelatihan kerja bagi calon	pelaksanaan
tenaga kerja Penyandang	kegiatan Pe
Disabilitas dengan	nyelenggara
Pelayanan atau Pelayanan	
Khusus diatur dalam	Pelindungan
Peraturan Bupati (Pasal	Dan
27).	Pelayanan
e) PERBUP ttg Ketentuan	Bagi
lebih lanjut mengenai tata	Masyarakat
cara pemberian dukungan	Penyandang
dan/atau bantuan dari	Disabilitas.
	Pada angka 2)
	diatas tetap
	mengatur tata
	cara dan
. onyandang Dioabintao	mekanisme
yang mamma	penyusunan
	dan penetapan
	Rencana Aksi
condin alaa kolompok	
dodna boroanna alatai	Daerah  Relindungan
	Pelindungan
(	Penyandang  Disabilitas
i) I ENDOT tig Notontaan	Disabilitas,
lebih lanjut mengenai	sementara
pombinaan aan	khusus angka
porigorribarigari olarriaga	1) yang
i dilyanaang bidabilitad	ditetapkan
alatai aalaiii i Ciataiaii	hanya
Dapati (1 asai +2).	RENCANA
u) EERDUE IIU NEIEIIIUAII	AKSI
lebih lanjut mengenai	DAERAH.
, 0	

pembinaan dan
pengembangan seni
budaya dan pariwisata
bagi Penyandang
Disabilitas diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal
45).
h) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai
pembinaan dan
pengembangan seni
budaya dan pariwisata
bagi Penyandang
Disabilitas diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal
52).
i) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai
syarat, tata cara penzinan,
pelaksanaan rehabilitasi
dan persyaratan
pembebasan biaya
Habilitasi dan Rehabilitasi
bagi Penyandang
Disabilitas yang tidak
mampu, harus
membebaskan biaya
Habilitasi dan Rehabilitasi.
diatur dalam Peraturan
Bupati (Pasal 63).
j) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai
Habilitasi dan Rehabilitasi
sosial bagi Penyandang
Disabilitas diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal

67).
k) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian bantuan
sosial Penyandang
Disabilitas diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal
68 ayat 7).
I) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pemberian
penghargaan dalam
mewujudkan pelindungan
dan pelayanan bagi
Penyandang Disabilitas
diatur dalam Peraturan
Bupati (Pasal 74).
m) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara penyelenggaraan
pembinaan dan
pengawasan terhadap
Pelindungan dan
Pelayanan foagi
Penyandang Disabilitas
diatur dalam Peraturan
Bupati (Pasal 77 ayat 2).
n) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam
Peraturan Bupati (Pasal
81).
o) PERBUP ttg Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata
cara pelaksanaan

6 Peraturan Daerah No. 4	18 April	Berlaku	koordinasi dan pembinaan untuk penyediaan tenaga ahli bahasa isyarat diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 85 ayat 3 dan ayat 4).	Menetapkan PERBUP	Bagian	PERBUP No. 32 Thn 2024	SEI ESAI
Thn 2023 Tentang Dukungan Dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren	2023	Dellaru	untuk menetapkan beberapa PERBUP antara lain mengatur:  a) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Pasal 11).  b) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dan	yang mengatur Teknis Pelaksanaan yang diatur dalam PERDA yang memuat ruang lingkup	Kesejahteraan Rakayat Sekretariat Daerah (Inisiatif DPRD)	ttg Pedoman Pelaksanaan Dukungan Dan Fasilitasi Bagi Pondok Pesantren.	

			Pemerintah Daerah pada fungsi dakwah Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 17).  e) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah pada fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 18). f) Ketentuan mengenai tata cara monitoring dan evaluasi terhadap dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan bagi Pondok Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati				
Peraturan Daerah No. 3 Thn 2023 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	'	Berlaku	ketentuan Pasal 65 ayat (21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,	yang menggantikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019	Pemberdayaan	Belum ada Pengajuan RAPERBUP ke Bagian Hukum	BELUM PROSES/ TIDAK ADA PENGAJUAN

Adapun amanat dalam Permusyawaratan Desa
PERDA yakni:
PERDA mengamanatkan
untuk menetapkan beberapa
PERBUP antara lain
mengatur:
a) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewenangan
BPD diatur dengana
Peraturan Bupati (Pasal
3).
b) Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewajiban BPD
diatur dengan Peraturan
Bupati (Pasal 9).
c) Ketentuan lebih lanjut
terkait pemberian cuti
diatur dalam Peraturan
Bupati (Pasal 11).
d) Ketentuan lebih lanjut
mengenai Persyaratan
calon anggota BPD diatur
dengan Peraturan bupati
(Pasal 12).
e) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
mekanisme pengisian
anggota BPD diatur
dengan Peraturan Bupati
(Pasal 13).
f) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pengucapan sumpah/janji
anggota BPD diatur
dengan Peraturan Bupati
(Pasal 16).

		g) Ketentuan lebih lanjut
		mengenai tata cara
		mekanisme
		pemberhentian anggota
		BPD diatur dengan
		Peraturan Bupati (Pasal
		18).
		h) Ketentuan lebih lanjut
		mengenai pengisian BPD
		antarwaktu diatur dalam
		Peraturan Bupati (Pasal
		19).
		i) ketentuan lebih lanjut
		mengenai tunjangan
		Pimpinan dan Anggota
		BPD ditetapkan dengan
		Peraturan Bupati (Pasal
		27).
		j) Ketentuan lebih lanjut
		mengenai biaya
		operasional kegiatan BPD
		diatur dengan Peraturan
		Bupati (Pasal 28).
		k) Ketentuan lebih lanjut
		mengenai tunjangan hari
		raya bagi Anggota BPD
		diatur dengan Peraturan
		Bupati (Pasal 29).
		l) Ketentuan lebih lanjut
		mengenai Jaminan Sosial
		Ketenagakerjaan,
		Pembayaran dan
		pembebanan iuran
		jaminan sosial mengacu
		pada Peraturan Bupati
		(Pasal 30).
I I	1 1	

8	Peraturan Daerah No. 2	11 April	m) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan n atas prestasi pimpinan dan anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 35).		Dinas	Telah diajukan Judul	BELUM PROSES
		2023	Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah mengamanatkan: a) Pasal 15 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan PUG	menggantikan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	RAPERBUP ttg Pedoman	/ DOKUMEN BELUM

				PUG) diatur dalam				
9		11 April 2023	Berlaku	Peraturan Bupati.  a) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, Pasal 5 dan Pasal 6, diatur Pembentukan dan Tata Cara Pelayanan UPTD PPA dengan Peraturan Bupati, dan Pasal 15 ayat (3) tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan diatur dengan Peraturan Bupati.  b) b) PERDA ini menggantikan PERDA PERDA No. 5 Thn 2014 ttg Perlindungan Perempuan Dan Anak yang mengatur materi muatan tekait Perlindungan Perempuan.	mengenai Pembentukan dan Tata Cara Pelayanan UPTD PPA. b) Materi PERBUP dapat juga memuat materi detail tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu	Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	(Catatan: karena tata cara dan bentuk laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu merupakan amanat langsung dari PERDA, seyogyanya
Tahu	n 2024			The state of the s				
1	Peraturan Daerah No. 9 Thn 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	2024	Daya Guna	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD (Pasal 18).	tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025.	dan Aset Daerah	PERBUP No. 29 Thn 2024 ttg Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2024.	
2	Peraturan Daerah No. 8	9 Agustus	Tidak Punya	Bupati Penajam Paser Utara	Menetapkan PERBUP	Badan Keuangan	PERBUP No. 28 Thn 2024	SELESAI

Thn 2024 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	2024	Daya Guna	menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD (Pasal 11)	tentang Pertanggungjabawan Pelaksanan APBD TA 2023	dan Aset Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. PPU TA 2023	
Peraturan Daerah No. 7 Thn 2024 Tentang Pedoman Zona Nilai Tanah	30 Januari 2024	Berlaku	<ul> <li>a) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan penentuan Nilai Indikasi Rata-Rata Tanah, inventarisasi dan identifikasi Nilai Tanah, dan klasifikasi Zona Nilai Tanah diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 12).</li> <li>b) Mekanisme penanganan pengaduan dan keberatan terhadap pemanfaatan peta zona nilai tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 16).</li> </ul>			tentang TATA CARA PEMBENTUKAN/ PENYEMPURNAAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDEKS RATA- RATA saat ini berada pada tahap FASILITASI GUBERNUR	PROSES (Fasilitasi Gubernur)
Peraturan Daerah No. 5 Thn 2024 Tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana	2024	Berlaku		Materi Pasal yang dapat digabung dalam beberapa PERBUP yang sesuai ruang lingkup.	Bencana Daerah	Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Bencana.	1) SELESAI (hanya sebagian kecil materi Pasal 82, yang diatur mengenai pengelolan dana dari APBD). 2) BELUM PROSES/ TIDAK

Penanggulangan Bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Pasal 14). c) PERBUP ttg Pendidikan dan pelatihan	ADA PENGAJUAN (17 Materi Pasal dan teknis lainnya)
penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 21 ayat 4).	
d) PERBUP ttg pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 23 ayat 4).	
e) PERBUP ttg Kemudahan akses saat saat Status Keadaan Darurat Bencan diatur dengan Peraturan	
Bupati (Pasal 33).  f) PERBUP ttg Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 38 ayat 5).	
g) PERBUP ttg sistem komando pengendalian lapangan status keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 43 ayat 5).	
h) PERBUP ttg pedoman penyusunan rencana operasi Tanggap Darurat Bencana diatur dengan Peraturan Bupati. (Pasal	

	45 ayat 4).
	i) PERBUP ttg Koordinasi
	pelaksanaan tanggap
	darurat bencana oleh
	masyarakat, Lembaga
	Internasional, Lembaga
	Asing Non Pemerintah,
	dan lembaga usaha diatur
	dengan Peraturan Bupati
	(Pasal 47 ayat 3).
	j) PERBUP ttg
	Pembangkitan Kembali Kabidupan Sasial Budaya
	Kehidupan Sosial Budaya
	Masyarakat diatur dengan
	Peraturan Bupati (Pasal
	64 ayat 2).
	k) PERBUP ttg partisipasi
	dan peran serta lembaga
	dan organisasi
	kemasyarakatan, lembaga
	usaha dan masyarakat
	pada rencana kegiatan
	Rekonstruksi tahap pasca
	bencana diatur dengan
	Peraturan Bupati. (Pasal
	66 ayat 2).
	I) PERBUP ttg Peningkatan
	kondisi sosial, ekonomi
	dan budaya pada kegiatan
	rekonstruksi pasca
	bencana diatur dengan
	Peraturan Bupati (Pasal
	67 ayat 2).
	m) PERBUP ttg
	penyelenggaraan
	Kawasan Rawan Bencana

		1		P		1		1
				diatur dengan Peraturan				
				Bupati (Pasal 69 ayat 4).				
				n) PERBUP ttg partisipasi				
				masyarakat dalam				
				penyediaan keuangan				
				penanggulangan bencana				
				yang bersumber dari				
				masyarakat diatur dengan				
				Peraturan Bupati (Pasal				
				79).				
				o) PERBUP ttg pengelolaan				
				dana penanggulangan				
				bencana diatur dengan				
				Peraturan Bupati (Pasal				
				82).				
				p) PERBUP ttg pengelolaan				
				barang penanggulangan				
				bencana diatur dengan				
				Peraturan Bupati (Pasal				
				86).				
				q) PERBUP ttg mekanisme				
				peran serta masyarakat				
				dalam penanggulangan				
				bencana diatur dengan				
				Peraturan Bupati (Pasal				
				88 ayat 3).				
				r) PERBUP ttg tata cara dan				
				tahapan penerapan sanksi				
				administrasi sebagaimana				
				dimaksud pada ayat (1)				
				diatur dengan peraturan				
				Bupati (Pasal 95 ayat 3).				
5	Peraturan Daerah No. 4	30 Januari	Berlaku	, , ,	a) Menetapkan PERBUP	Dinas Perikanan	TIDAK ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI
	Thn 2024 Tentang	2024		Ttata cara pengawasan dan	ttg Perlindungan Dan	(Inisiatif DPRD)		- 237.
	Perlindungan Dan			partisipasi masyarakat dalam	Pemberdayaan			
	Pemberdayaan Nelayan,			penyelenggaraan	Nelayan, Pembudi			
1	1	I	I	F , 5 - 5 - 19 g 4 - 44 - 11		l		

Pembudi Daya Ikan,			perlindungan dan	Daya Ikan, Pengolahan			
Pengolahan Dan			pemberdayaan nelayan,	Dan Pemasaran Serta			
Pemasaran Serta			pembudidaya ikan, dan	Petambak Garam.			
Petambak Garam			petambak garam diatur dalam	h) Materi Pasal PERBUP			
			peraturan bupati. (Pasal 27	dapat mengatur Teknis			
			ayat 6)	Pelaksanaan secara			
				keseluruhan dari			
				PERDA.			
				c) Materi PERBUP dapat			
				saling terkait dengan			
				PERDA No. 4 Thn			
				2024 ttg Perlindungan			
				Dan Pemberdayaan			
				Nelayan, Pembudi			
				Daya Ikan, Pengolahan			
				Dan Pemasaran Serta			
				Petambak Garam.			
Peraturan Daerah No. 3		Berlaku	Menetapkan Beberapa	1 Menetapkan			BELUM PROSES
Thn 2024 Tentang	2024		PERBUP antara lain:	) PERBUP	1	ı	/TIDAK ADA
Penyelenggaraan			a) PERBUP ttg pembentukan	yang	dan Arsip Daerah		PENGAJUAN
Perpustakaan			perpustakaan, Taman	mengatur		BULAN LITERASI pada	BARU
			Bacaan dan/atau sebutan	paling		Tahun 2024, namun	
			lain yang sejenis	sedikit ruang		sampai saat ini tidak	
			sebagaimana dimaksud	lingkup seba		pernah dilengkapi	
			pada ayat (1) dan ayat (2)	gaimana		persyaratan sehingga	
			diatur dalam Peraturan	dimaksud		tidak dapat dilanjutkan.	
			Bupati (Pasal 14 ayat 3).	pada 5			
			b) PERBUP ttg Tata tertib	perintah			
			perpustakaan diatur dalam	, December			
			Peraturan Bupati (Pasal	PERDA.			
				2 PERBUP			
			2 : aya: 1 ):	) tersebut			
			c) PERBUP ttg tata cara	dapat			
			pelayanan Perpustakaan	digabung			
			dengan Peraturan Bupati	dalam 1			
			(Pasal 35 ayat 7).	PERBUP			
	I	1	d) PERBUP ttg Ketentuan		1		1

			f)	Hak Tenaga perpustakaan diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal38 ayat 2). PERBUP ttg bentuk kegiatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 41 ayat 3). PERBUP ttg tata cara pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan gemar membaca serta pelestarian Naskah Kuno diatur dengan Peraturan Bupati (Pasal 45 ayat 3). PERBUP ttg Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan diatur				
7	26 Januari 2024	Berlaku		Ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib untuk dilakukan penyesuaian; Pengatur hasil penataan perangkat daerah	Menyesuaikan PERBUP yang mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan adanya	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	a) Peraturan Bupati No. 8 Thn 2024 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah. b) PERBUP diatas mencabut	

_				Pekerjaan Umum dan	perubahan kedua PERDA perangkat daerah dimaksud.		sekitar 39 PERBUP Tupoksi dari PERDA awal/Perubahan Kesatu.	
8	Peraturan Daerah No. 1 Thn 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	04 Januari 2024	Berlaku	pengaturan teknis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 21 amanat Pasal yang dapat dikelompokan dalam 2 klasifikasi penggolongan pedoman teknis yakni Pajak dan Retribusi.	yang menjadi pedoman teknis dari seluruh muatan materi PERDA	Badan Pendapatan Daerah	1) Peraturan Bupati No. 1 Thn 2024 ttg Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa. 2) Peraturan Bupati No. 45 Thn 2024 ttg Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Peraturan Bupati No. 6 Thn 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah. 4) Peraturan Bupati No. 45 Thn 2024 ttg Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5) Peraturan Bupati No. 7 Thn 2025 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah.	PERBUP 7 Thn 2025) tetap dievaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan di lapangan, dan dengan banyaknya muatan meteri jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk yang ada hubungan dengan pungutan Pajak oleh Pemerintah Provinsi)

9	Peraturan Daerah No. 6	30 Januari	Berlaku	Menetapkan Beberapa	Menetapkan sekitar 5	DPRD	a) PERBUP No. 51 Thn	1) SELESAI (2
	Thn 2024 Tentang	2024		PERBUP antara lain:	PERBUP sebagaimana		2024 ttg Standar	Materi Pasal 10
	Penyelenggaraan			a) PERBUP ttg Rencana	dimaksud dari hasil		_	dan Pasal 34). 2)
	Penanaman Modal Di				penelusuran Perda No. 6		Berusaha Berbasis Risiko,	1 ' 1
	Daerah			(Pasal 6).	Thn 2024		1	PROSES/ TIDAK
							•	ADA
				b) PERBUP ttg				PENGAJUAN (3
				pendelegasian			•	Materi Raperbup
				kewenangan Bupati				lainnya yakni:
				kepada kepala DPMPTSP			•	amanat Pasal 6,
				dalam menyelenggarakan			PERBUP No. 52 Thn 2024	· ·
				pelayanan Perizinan				30 ayat 4, Pasal
				Berusaha Berbasis Risiko				31 ayat 4)
				dan Nonperizinan (Pasal			Penyelenggaraan	or ayat +)
				10 ayat 3 dan ayat 6).			Perizinan Berusaha	
				c) PERBUP ttg Manajemen			Berbasis Risiko, Perizinan	
				penyelenggaraan			Berusaha, Perizinan Non	
				Perizinan termasuk			Berusaha dan	
				didalamnya memuat			Nonperizinan Kepada	
				petunjuk teknis			Kepala Dinas Penanaman	
				penyuluhan kepada			Modal Dan Pelayanan	
				masyarakat (Pasal 21,			Terpadu Satu Pintu Kab	
				Pasal 30 ayat 4, Pasal 31			PPU. c) PERBUP No. 53	
				ayat 4).			Thn 2024 ttg Pemberian	
				d) PERBUP ttg Petunjuk			Insentif dan Kemudahan	
				Teknis pemberdayaan,			Investasi di Daerah.	
				dan perlindungan bagi			investasi di Daeran.	
				Koperasi dan Usaha				
				Mikro, kecil, menengah				
				dan koperasi dalam				
				pelaksanaan penanaman				
				Modal (Pasal 34).				
				e) PERBUP ttg Pemberian				
				Insentif dan/ atau				
				Pemberian Kemudahan				
				Penanaman Modal diatur				
				dengan Peraturan Bupati				
I	I	I	I	1	I	1	I	ı l

				(Pasal 39).				
	Peraturan Daerah No. 10 Thn 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	30 Desember 2024	Berlaku	Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur	Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2025	dan Aset Daerah	Peraturan Bupati No. 57 Thn 2024 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	SELESAI
Tahu	n 2022							
	Peraturan Daerah No. 13 Thn 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023	22 Desember 2022	Tidak Punya Daya Guna	APBD TA.2023 (Pasal 18). b) PERDA ini tidak	Menetapkan Perbup ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.	Perencanaan,	PERBUP No. 3 Thn 2022 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.	SELESAI
	n 2025	_						
		08 April 2025		2025, memuat ketentuan pengaturan teknis Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik dalam 5 amanat Pasal sebagai berikut:	Agar segera menetapkan PERBUP sebagai petunjuk Pelaksanaan PERDA sesuai ketentuan yang didelegasikan dan dapat disatukan dalam 1 PERBUP atau beberapa PERBUP sesuai ruang lingkup yang diatur.		BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

		Peraturan Bupati. c) Pasal 14: Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang melaksanakan pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati. d) Pasal 15: Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang telah mendapatkan insentif namun tidak melaksanakan ketentuan pertanian Organik diatur dalam Peraturan Bupati. e) Pasal 17 ayat (2): Dalam rangka penyelenggaraan pertanian Organik di Daerah, Pemerintah				
		pertanian Organik di				
	08 April 2025	2025, memuat ketentuan pengaturan teknis Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau dan Taman dalam 6 amanat Pasal sebagai berikut:	PERBUP sebagai	Lingkungan Hidup (inisiatif	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELESAI

mengenai tata cara
inventarisasi (Inventarisasi
Pohon dan inventarisasi
kondisi lingkungan) diatur
lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
b) Pasal 12 ayat (4):
Ketentuan lebih lanjut
mengenai pemetaan
Pengelolaan Pohon
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.
c) Pasal 13 : Ketentuan
mengenai penetapan
pembagian RTH publik,
Jalur Hijau dan Taman
diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
d) Pasal 30 ayat (4):
Ketentuan mengenai tata
cara peran serta Magyarakat dalam
Masyarakat dalam  Pangalalan Bahan diatur
Pengelolaan Pohon diatur
lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.
e) Pasal 36 ayat (3):
Ketentuan lebih lanjut
mengenai persyaratan dan
tata cara Perizinan
Penebangan Pohon diatur
dalam Peraturan Bupati.
f) Pasal 44 : Ketentuan
mengenai pelimpahan
kewenangan penjatuhan
sanksi administratif dan

				tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.			
3	Peraturan Daerah No. 3 Thn 2025 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan	02 Mei 2025	Berlaku	Memperhatikan ketentuan PERDA ini pada Pasal 5: Pendidikan Kepramukaan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah, Pasal 10: Dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan merujuk kepada: a. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan Pasal 19 ayat (2): Tanggung Jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada Perangkat Daerah berada pada kepala Perangkat Daerah, maka PERDA ini, seharusnya memiliki petunjuk pelaksanaan PERDA yang menjadi pedoman teknis bagi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	BELUM ADA PENGAJUAN	BELUM SELSAI

Peraturan Daerah No. 4 Thn 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	02 Mei 2025B	nomenklatur nama Perangkat Daerah berdasarkan Pasal 3 huruf e angka 1 PERDA ini, maka Perangkat Daerah yang mengalami perubahan tersebut harus dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun	PERBUP tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	BELUM DIAJUKAN	BELUM SELESAI	
Peraturan Daerah No. 5 Thn 2025 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	02 Mei 2025B	PERDA ini mengatur sekitar 17 Pasal sebagai perintah untuk mengatur teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yakni: a) Pasal 49 Ayat (5) : Analisis	PERKADA sebagai amanat PERDA No. 5 Thn 2025 tentang Pengelolaan Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah		BELUM SELESAI	

	diatur dalam PERKADA	Daerah sesuai jenis		
	sesuai dengan ketentuan	materinya, atau berdiri		
	peraturan perundang-	sendiri sesuai dengan		
		ruang lingkup yang		
		akan di atur dan/atau		
	) . aca. cc / iyat (c) .	kondisi yang		
	, ,	menyebabkan		
		PERKADA harud diatur		
	pombonan dan	terpisah.		
	1 55 57	terpisari.		
	subsidi diatur dalam			
	PERKADA sesuai dengan			
	ketentuan peraturan			
	perundang-undangan.			
	d) Pasal 62 Ayat (3) :Batas			
	minimal kapitalisasi aset			
	sebagaimana dimaksud			
	pada ayat (2) huruf c			
	diatur dalam PERKADA.			
	e) Pasal 79 Ayat (4) :			
	Ketentuan mengenai tata			
	cara Pemberian Pinjaman			
	Daerah diatur dalam			
	PERKADA sesuai dengan			
	ketentuan peraturan			
	perundang-undangan.			
	) Pasal 103 Ayat (1) dan			
	Ayat (2) : Berdasarkan			
	persetujuan bersama			
	(Catatan: Terhadap			
	APBD), Bupati			
	menyiapkan rancangan			
	PERKADA tentang			
	Penjabaran APBD dan			
	Pasal 110 Ayat (1) :			
	Penetapan PERKADA			
	tentang Penjabaran			
1 1 1	I.	I	I	I I

 <u> </u>
APBD.
g) Pasal 104 Ayat (1): Dalam
hal Bupati dan DPRD tidak
mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60
(enam puluh) hari sejak
disampaikan rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Bupati kepada
DPRD, Bupati menyusun
rancangan PERKADA
tentang APBD paling tinggi
sebesar angka APBD
tahun anggaran
sebelumnya. (Catatan:
kondisi situasional).
h) Pasal 118 : Terhadap
kewajiban
pemindahbukuan yang
secara teknis belum dapat
dilakukan setiap hari,
pemindahbukuan dapat
dilakukan secara berkala
yang ditetapkan dalam
PERKADA dan ketentuan
sesuai rencana
pengeluaran sebagai
operasi rekening yang
menampung pagu dana
untuk membiayai Kegiatan
Pemerintah Daerah dari
Rekening Pengeluaran
ditetapkan dalam
PERKADA.
i) Pasal 127 : Ketentuan
lebih lanjut mengenai tata

cara pelaksanaan penyusunan Anggaran	
	l l
I I Voe den CDD dietus delese	
Kas dan SPD diatur dalam	
PERKADA berpedoman	
pada ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
j) Pasal 128 ayat (2) : Dalam	
hal kondisi geografis	
Daerah sulit dijangkau	
dengan komunikasi,	
transportasi, dan	
keterbatasan pelayanan	
jasa keuangan, serta	
kondisi objektif lainnya,	
penyetoran penerimaan	
(Catatan: pada ayat 1	
diatur paling lambat dalam	
waktu 1 hari) dapat	
melebihi 1 (satu) hari yang	
diatur dalam PERKADA.	
k) Pasal 135 ayat (2) : Batas	
jumlah pengajuan SPP TU	
harus mendapat	
persetujuan dan PPKD	
dengan memperhatikan	
rincian kebutuhan dan	
waktu penggunaannya	
ditetapkan dengan	
PERKADA.	
l) Pasal 144 : Ketentuan	
batas waktu penerbitan	
surat pengesahan laporan	
pertanggungjawaban	
pengeluaran (Catatan :	
Bendahara	
Pengeluaran/Bendahara	

Pengeluaran pembantu
pada SKPD) dan sanksi
keterlambatan
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
ditetapkan dalam
PERKADA.
m) Pasal 155 Ayat (2):
Pergeseran anggaran
antar obyek belanja,
dan/atau antar rincian
obyek belanja dilakukan
melalui perubahan
PERKADA tentang
Penjabaran APBD.
n) Pasal 155 Ayat (7):
Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara
pergeseran anggaran
diatur dalam PERKADA
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
o) Pasal 158 ayat (1) dan
ayat (3) : Perubahan
APBD hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam
keadaan luar biasa dan
Ketentuan mengenai
perubahan APBD akibat
keadaan luar biasa diatur
dalam PERKADA sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-

	undangan.	
	p) Pasal 182 Ayat (4) : Atas	
	dasar persetujuan	
	bersama (Catatan:	
	terhadap Rancangan	
	Peraturan Daerah tentang	
	pertanggungjawaban	
	pelaksanaan APBD oleh	
	Bupati dan DPRD)	
	sebagaimana dimaksud	
	pada ayat (3), Bupati	
	menyiapkan rancangan	
	PERKADA tentang	
	penjabaran	
	pertanggungjawaban	
	pelaksanaan APBD. Pasal	
	184 mengatur ketentuan	
	Penetapannya.	
	q) Pasal 191 ayat (1) dan	
	Ayat (2) : Pemerintah	
	Daerah dapat membentuk	
	BLUD dalam rangka	
	meningkatkan	
	pelayanankepada	
	masyarakat sesuai dengan	
	ketentuan peraturan	
	perundang-undangan dan	
	Dalam rangka	
	meningkatkan pelayanan	
	kepada masyarakat,	
	Bupati menetapkan	
	kebijakan fleksibilitas	
	BLUD dalam PERKADA	
	yang dilaksanakan oleh	
	pejabat pengelola BLUD.	
	PERDA No. 5 Thn 2025	
l		I

6	Peraturan Daerah No. 6 Thn 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2045	02 Mei 2025	Berlaku	<ul> <li>3) Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan</li> <li>4) Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja.</li> <li>Pada Pasal 6 ayat (7)</li> <li>PERDA ini, memuat perintah untuk menetapkan PERBUP sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> </ul>	a) Agar membentuk PERBUP tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun. b) Penyusunan rancangan awal RKPD, dimulai pada minggu	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
				mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;			
				tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah amanat dari Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, amanat lain dalam PERMENDAGRI tersebut yakni Penetapan 3 PERKADA meliputi: 1) Perkada yang mengatur			

				tahun sebelum tahun		
				rencana.		
				c) Rancangan akhir RKP		
				Daerah diselesaikan		
				paling lambat pada		
				akhir bulan Mei dan		
				menjadi bahan		
				penyusunan rancangan		
				Perkada tentang		
				RKPD.		
				d) Untuk perubahan RKP		
				Daerah, maka		
				penyusunan rancangan		
				perubahan RKP		
				Daerah dimulai paling		
				lambat pada awal		
				bulan Juni pada tahun		
				berjalan.		
7	Peraturan Daerah No. 7	20 Agustus	Berlaku		Badan	
	Thn 2025 Tentang	2025			Perencanaan,	
	Rencana Pembangunan				Penelitian dan	
	Jangka Menengah Daerah				Pengembangan	
	Tahun 2025-2029					
8	Peraturan Daerah No. 8	11	Berlaku		Badan Keuangan	
		September			dan Aset Daerah	
		2025				
	Pelaksanaan Anggaran					
	Pendapatan dan Belanja					
	Daerah Tahun Anggaran					
	2024					